

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini, teks yang akan dianalisis dan diinterpretasi adalah indikator yang telah ditentukan, yakni bagian-bagian dari novel *Orang-Orang Oetimu* yang menyinggung kekuasaan, atau tokoh yang memiliki hubungannya dengan kekuasaan. Data-data penelitian akan dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk dan diperkaya dengan interpretasi tentang kekuasaan menurut Foucault, sesuai dengan penjelasan pada bab II.

5.1 Analisis Data

Pada bagian analisis, akan dibuatkan tabel kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci untuk memperkaya teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada tahapan ini, setelah dipilah-pilah, bagian atau fragmen yang akan dianalisis berjumlah 14. Berikut rincian analisis data penelitian ini:

Tabel Analisis 5.1

Teks	Ada tiga partai yang berdiri menjelang dekolonisasi itu. UDT yang menginginkan persatuan dengan Portugal, Fretilin yang menginginkan kemerdekaan penuh—sebelumnya bernama ASDT—dan Apodeti yang kecil dan ingin bersatu dengan Indonesia, negara tetangga bekas jajahan Belanda. Di masa ketika Estado Novo berkuasa, tidak ada partai untuk orang-orang Timor. PIDE selalu ada untuk	Dari segi kebahasaan, narasinya disampaikan secara implisit dengan pembangunan latar. Selain itu, ada juga bentukan kalimat yang menggunakan metafora.
-------------	---	--

	menghancurkan setiap pergerakan politik. Kini orang-orang PIDE di kota itu memang masih mondar-mandir dengan nama baru, juga masih menempati rumah dinas seolah-olah revolusi tidak pernah terjadi, tetapi mereka tidak bisa membendung aktivitas politik. Orang-orang di negeri itu telah ditekan untuk waktu yang lama, sehingga begitu mendapatkan kebebasannya, mereka seperti anjing-anjing lapar.	
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Lokasi Felix Nesi yang tidak jauh dari Timor Timur dan itu menjadi kegelisahannya sendiri, yang mana itu tersinyalir dalam pengetahuan sejarahnya
Konteks Sosial	Situasi politik Timor-Timur (Timor Portugis) tahun 1974	Menggambarkan situasi awal ketika Portugal memberikan kebebasan berorganisasi dan menyalurkan pendapat di Timor Portugis dan bagaimana masyarakatnya mesti masuk ke berbagai partai yang muncul saat itu

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Dari segi teks, latar menjadi unsur yang diperkuat dalam narasi. Latar yang dimaksud adalah locus sekaligus latar belakang di balik sebuah cerita. Selain itu dari segi kebahasaan, pengarangnya menuturkan maksudnya secara eksplisit atau langsung dengan tetap mengimbangnya dengan metafora yang mudah dimengerti. Karena itu, pada bagian kognisi sosial, dalam hal ini kognisi pengarang, hendak menuturkan

pengetahuan sejarahnya tentang Timor Timur sekaligus memperkuat latar tempat cerita dalam novel. Dengan penggambaran ini, ceritanya menjadi kuat dan bisa dipahami karakter-karakter tokohnya, dan itu semua disiasati. Selain itu, pada kognisi sosial, pengarang mengilustrasikan tempat bertumbuh-kembangnya pengarang yang tidak jauh dari Timor Timur.

Mengenai konteks, penjelasannya ialah pada tahun 1960-an, di Portugal, terjadi pergantian kekuasaan dari tangan Antonio de Liveira Salazar yang diktaktor ke tangan perdana Menteri Marcello Caetano (Tomodok, 1994: 11). Salazar memimpin dari tahun 1926 sampai tahun 1968, sedangkan Caetano memerintah dari tahun 1968 sampai 1974 (Dhosa, 2019: 4). Pergantian pemerintahan itu mengakibatkan liberalisasi di mana sudah ada pengizinan bagi organisasi-organisasi di luar pemerintahan, seperti *Commissao Democratica Eleitoral* (CDE), *Commissao Eleitoral de Unidade Democratica* (CEUD), dan *Commissao Eleitoral Monarquica* (ECEN). Kendati demikian, kebebasan itu hanya sebuah siasat untuk melunakkan pandangan rakyat dan untuk memberi kesan ke dunia luar bahwa Portugal sudah memasuki era baru yang memberi kebebasan berorganisasi dan menyalurkan berpendapat.

Nyatanya, kebebasan itu tak sepenuhnya utuh, karena orang-orang pribumi tetap dibungkam dan selalu diawasi, dintimidasi, dan kerap dipersekusi oleh sekelompok polisi rahasia bernama *Direccao General de Segurance* (DGS). DGS sendiri merupakan cikal bakal dari *Policia Internacional e Defesa de Estado* (PIDE) sebagaimana disebut dalam novel *Orang-Orang Oetimu*, merupakan kaki tangan dari

Estado Novo. PIDE adalah cabang dari badan kepolisian, tetapi secara taktis-administratif terpisah dari angkatan kepolisian umum (Tomodok, 1994: 16).

Pada tahun 1974, terjadi desakan terhadap pemerintah Portugal, yang waktu itu dipimpin Spínola, untuk memberikan kemerdekaan penuh kepada Timor Timur (Timor Portugis). Pemberian hak untuk menentukan pilihan sendiri mulanya menimbulkan kontradiksi atau perbedaan-perbedaan sikap politik dalam masyarakat. Karena itu, perbedaan-perbedaan itu terkristal dalam tiga partai (Tomodok, 1994: 87—88). *Pertama*, Partai *Uniao Democratica Timorence* (UDT). Partai ini menghimpun masyarakat yang tetap ingin bergabung dengan Portugal. Terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan kuat dalam pemerintahan—kebanyakan orang Portugis putih, yang ditugaskan atau dibuang ke Timor Portugis (Timor Timur)—raja-raja pribumi, dan keluarga-keluarga pemilik kebun kopi. *Kedua*, Partai *Associacao Social Demokrata Timorence* (ASDT) yang menginginkan kemerdekaan bagi Timor Portugis (Timor Timur). Partai ini dipimpin oleh Xavier Amaral dan Ramos Horta, yang kemudian berubah nama menjadi *Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente* (Fretilin). *Ketiga*, Partai Apodeti sebagai kelompok penerus aspirasi pemberontakan Viqueque tahun 1959, yang menginginkan integrasi dengan negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, Fretilin-lah menjadi partai politik paling berpengaruh. Fretilin berupaya memanfaatkan situasi *chaos* di seluruh Timor Portugis melalui berbagai kerusuhan dan beragam agitasi. Fretilin berjuang meliberasi Timor Portugis (Timor Timur) dari kungkungan kolonial yang masih berhadapan dengan

Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia (Dhosa, 2019: 4). Karena itu, Partai Fretilin adalah partai komunis, sekaligus menjadi medan perebutan antara komunis yang pro Moskow dan komunis yang pro Peking, dan dalam perkembangannya menjadi pro Moskow (Tomodok, 1994: 203). Itulah alasan mengapa Indonesia terus didesak oleh Amerika untuk segera menguasai Timor Timur, karena pada arena politik global, sedang terjadi perang dingin sekaligus pertarungan ideologi antara Amerika melawan Uni Soviet.

Tabel Analisis 5.2

Teks	“Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, seluruh penduduk yang pandai dan sehat. Musim panen telah tiba. Kita semua akan memanen jagung dan singkong. Namun tahukah Anda, apa itu jagung dan singkong? Jagung dan singkong adalah makanan nenek moyang kita. Nenek moyang kita bodoh dan punya gizi yang buruk, sebab mereka hanya makan jagung dan singkong. Sudah ada penelitian dari Barat, bahwa dua makanan itu memiliki zat yang hanya bikin otak lemah. Ia tidak punya gizi apa-apa.” “Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, jangan biarkan kita mewarisi kebiasaan yang salah dan keliru itu. Mari, mari kita mulai makan nasi. Kita harus makan nasi, agar kita dan anak-anak kita menjadi manusia yang lebih berbudaya, lebih beradab, dan senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai sila pertama Pancasila.” (hal. 55 & 56)	Dalam pengembangan bahasa menggunakan gaya bahasa erotesis atau pertanyaan retorik, berupa pengumuman bernada pidato. Secara skematik atau mengikuti alur bahasanya, dikonstruksi dengan premis-premis bergaya repetisi dan satire.

Kognisi Sosial	Felix Nesi	Sebagai orang Timur, Felix menyajikan kritiknya terhadap masyarakat lokal yang selalu mudah dipengaruhi dan dianggap bodoh.
Konteks Sosial	Keadaan pangan Masyarakat Timor—Nusa Tenggara Timur saat masa pemerintahan Soeharto.	Era Orde Baru, saat Indonesia dihantui krisis pangan besar-besaran, masyarakat mengalami kelaparan yang laur biasa. Mestinya pangan-pangan lokal bisa dijadikan sebagai makanan pokok, tetapi dihegemoni oleh kepentingan politik global. Krisis ini diikuti dengan krisis pangan dan problem ekologis pada wilayah Timor, khususnya.

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Mengkaji segi teks dari petikan novel tersebut, dalam penuturannya menggunakan kutipan monolog yang bergaya pidato sehingga, dengan premis-premis yang repetitif dibubuhi dengan gaya bahasa erotesis dan satire membuat bahasanya mudah dimengerti. Erotesis atau pertanyaan retorik adalah gaya bahasa yang menggunakan pertanyaan dalam pidato atau tulisan dengan maksud mencapai efek yang lebih dalam dan penekanan yang wajar, tanda menghendaki adanya suatu jawaban (Keraf, 2010: 134). Erotesis atau pertanyaan retorik dalam teks: “*Namun tahukah Anda, apa itu jagung dan singkong?*” Sedangkan satire dalam teks ini ialah “*Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, jangan biarkan kita mewarisi kebiasaan yang salah dan keliru itu.*

Mari, mari kita mulai makan nasi. Kita harus makan nasi, agar kita dan anak-anak kita menjadi manusia yang lebih berbudaya, lebih beradab, dan senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai sila pertama Pancasila.”

Sementara pada tataran kognisi sosial Felix, sebagai pengarang, hidup di pulau Timor, di antara orang-orang yang pernah kelaparan akibat krisis pangan. Bagi Felix, kemiskinan tidak disebabkan oleh budaya, tetapi sebagai akibat dari penindaan dan hegemoni neo-kolonialisme. Hal ini dapat dijelaskan pada tataran konteks sosial dengan menyorot keadaan Indonesia waktu itu—Orde Baru—seperti situasi negara-negara berkembang lainnya di Asia, sedang berupaya memupuk ekonomi negara dengan beralih dari Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) kepada Industrialisasi ber-Orientasi Ekspor (IOE). Kenyataannya, IOE memerlukan peningkatan aktivitas negara dalam mendisiplinkan buruh, menyiapkan peraturan fiskal yang rumit, dan pembangunan fisik infrastruktur serta pengelolaan krisis fiskal dan moneter (Robison, 2012: 98).

Penjelasan ini berhubungan dengan studi perbandingan antara teori dependensi dan teori modernisasi, dua teori yang sama-sama meneropong masalah pembangunan Dunia Ketiga (Suwarsono & So, 1994: 106). Kedua paradigma klasik ini mengembangkan struktur teori yang dwi-kutub (*a bipolar theoretical framework*): teori modernisasi menyebutnya dengan istilah tradisional dan maju/modern, sedangkan teori dependensi klasik menggunakan istilah sentral/metropolis dan pinggiran/satelit.

Di balik kesamaan kedua teori ini, terdapat beberapa perbedaan (Suwarsono & So, 1994: 106—108) yang bertalian dengan konteks pembahasan novel ini, yakni: *Pertama*, teori modernisasi dan dependensi memiliki latar belakang berbeda dalam proses penemuan dan perumusan struktur paradigma. Teori modernisasi klasik sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi di Eropa dan teori struktural-fungsionalisme di Amerika, sementara teori dependensi dipengaruhi oleh program liberal dan moderat, serta teori neo-Marxis radikal. *Kedua*, aliran pemikiran modernisasi dan dependensi berbeda dalam menjelaskan sebab keterbelakangan dunia ketiga. Teori modernisasi lebih menekankan faktor dalam, seperti pengaruh negatif budaya tradisional di negara Dunia Ketiga, sedangkan teori dependensi menekankan faktor luar, yakni pengaruh kolonialisme dan neo-kolonialisme.

Ketiga, kedua teori klasik (modernisasi dan dependensi) berbeda dalam merumuskan implikasi kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk membangun Dunia Ketiga. Teori modernisasi melihat bahwa ikatan antara negara berkembang dan negara maju saling memberikan manfaat positif, khususnya bagi negara berkembang. Sebaliknya, teori dependensi justru melihat bahwa hubungan patron antara negara berkembang dan negara maju sebagai sebuah hubungan yang tidak berimbang. Karena hanya berakibat buruk pada negara berkembang yang akan semakin tertinggal. *Keempat*, kedua teori ini tersebut berbeda dalam menawarkan jalan keluar dari persoalan keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Teori modernisasi menganjurkan agar lebih mempererat ikatan negara maju dan negara berkembang melalui bantuan modal, peralihan teknologi, dan pertukaran budaya, sementara teori

dependensi memberikan anjuran yang kontradiktif, yaitu berupaya mengurangi bahkan memutuskan hubungan negara maju dan negara berkembang, sehingga memungkinkan pembangunan yang dinamis dan otonom.

Dengan penjelasan perbedaan antara teori modernisasi dan teori dependensi, dapat dilihat pembangunan Indonesia, secara khusus pada zaman Orde Baru, yang dapat dibilang teori dependensi lebih diterima. Arief dan Sasono dalam Suwarsono dan So (1994: 123—125) menggunakan lima tolok ukur untuk mendeteksi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni sifat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, proses industrialisasi, pembiayaan pembangunan, dan persediaan bahan makanan.

Pertama, mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia dibarengi dengan semakin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. *Kedua*, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dengan percepatan yang tinggi pula. Hal ini disebabkan oleh industri yang dikembangkan dengan industri padat modal ternyata tidak banyak menyerap tenaga. *Ketiga*, industrialisasi di Indonesia adalah industri ekstraversi, di mana memiliki tingkat ketergantungan modal dan teknologi asing yang tinggi. *Keempat*, akibat ketergantungan modal dan teknologi, Indonesia pun mengalami ketergantungan keuangan. *Kelima*, sekalipun telah sejak lama disadari betapa pentingnya—secara ekonomis dan politis—memiliki kemampuan swasembada pangan, khususnya beras, sampai dengan akhir tahun 1970-an, Indonesia belum mencapainya.

Persentase impor dalam keseluruhan penyediaan beras di Indonesia telah meningkat dari 3,6% pada tahun 1967 menjadi 10,3% pada tahun 1978. Walau demikian, pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa target untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras, sangat menjadi perhatian mereka (Suwarsono & So, 1994: 125). Karena itu, tidak heran apabila ditemukan banyak kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan ini sehingga berimplikasi pada kontradiksi ekonomis dan ekologis.

Mengenai masalah ekologis, Timor terletak di wilayah terkering di Indonesia. Tidak ada bagian wilayahnya yang mendapatkan curah hujan lebih dari 1.500 mm setahun, dan musim kemarau berlangsung enam sampai tujuh bulan pertahun (Klinken, 2015: 92). Karena ketergantungan penuh pada musim tanam yang singkat—ditambah dengan kesulitan menghindari makanan dari serangan hama sepanjang musim kemarau—masyarakat Timor biasa mengalami pekan-pekan “kelaparan normal”.

Lebih lanjut, studi Klinken (2015: 171) menerangkan bahwa pada tahun 1971, NTT masih sepenuhnya bertumpu pada pertanian, yang menyumbang 71% Pendapatan Domestik Provinsi Bruto. Akan tetapi selama dekade 1975—1986, sumbangan pemerintah pada Pendapatan Domestik Provinsi Bruto meningkat hampir dua kali lipat. Karena itu, sektor negara tumbuh mengorbankan sektor ekonomi. Dengan demikian, Kota Kupang dengan cepat mendiskreditkan wilayah pedesaan yang bertumpu pada pertanian.

Masalah baru muncul. Kupang yang telah menjelma menjadi pusat perekonomian alternatif, jumlah penduduknya bertambah banyak. Sementara memberi makan penduduk yang makin banyak dari lahan yang kering kerontang adalah sebuah kemustahilan. Pertanian non-pasar di pedalaman hampir tidak menghasilkan bahan makanan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk banyak orang di Kota Kupang. Implikasinya, seluruh NTT pada tahun 1960-an didata sebagai wilayah kurang gizi, karena penduduk mengandalkan ubi kayu yang buruk kandungan gizinya (Klinken, 2015: 171—172).

Bagaimanapun umbi-umbian adalah makanan pokok asli orang Timor, sementara beras hanya dimakan waktu ada kenduri/acara adat. Tahun 1966, produksi beras di NTT mencapai 57.000 ton, tetapi kekurangan 123.000 ton. Hal ini membuat pemerintah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh langkah nyata untuk membatasi jumlah pegawai negeri (Klinken, 2015: 172).

Tabel Analisis 5.3

Teks	Maka setiap kali Sersan Ipi muncul, selalu saja ada yang kena hajar, baik tukang ojek, sopir truk, ataupun anak-anak sekolah. Tak ada yang berani melawannya, sebab ia adalah aparat negara yang berseragam, dan ia bertindak atas nama negara, demi kebaikan daripada seluruh warga negara. Barang siapa melawan aparat berarti ia melawan negara, dan barang siapa melawan negara berarti ia adalah komunis. Ia akan dibunuh dan ditanam di hutan jati (Hal. 59)	Gaya ungkap penulis dituturkan dengan satire dan repetisi berjenis anafora dan epistrofa. Repetisi itu dikonstruksi dengan premis mayor, diikuti premis minor, kemudian konklusi. Pada titik ini bisa disebut koherensi sebab-akibat.
-------------	--	---

Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Menyukai bacaan-bacaan kiri sehingga tidak bersepakat jika komunisme selalu dianggap buruk. Felix memiliki rasa antipasti terhadap pejabat yang represif dan suka menggunakan kekerasan untuk mengamankan masyarakat sipil.
Konteks Sosial	Tindakan represif yang dialami masyarakat lokal dan aparat keamanan negara yang semena-mena menggunakan kekuasaannya	Pengarang mengilustrasikan situasi Orde Baru, di mana aparat keamanan sering bertindak semena-mena

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, pengembangan bahasa yang digunakan menggunakan koherensi sebab-akibat dengan gaya tutur repetisi anafora dan epistrofa. Anafora, sebagaimana dijelaskan Keraf (2010: 127) adalah repetisi yang berwujud perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya, seperti yang tampak pada teks: *barang siapa melawan aparat berarti ia melawan negara, dan barang siapa melawan negara berarti ia adalah komunis*. Sementara epistrofa adalah repetisi yang berwujud perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat berurutan (Keraf, 2010: 128), seperti yang tampak pada teks: *ia adalah aparat negara, dan ia bertindak atas nama negara, demi kebaikan daripada seluruh warga negara*.

Dari segi kognisi sosial, mengilustrasikan pengarang yang menyukai bacaan-bacaan kiri sehingga tidak bersepakat jika komunisme selalu dianggap buruk. Felix

memiliki rasa antipati terhadap pejabat yang represif dan suka menggunakan kekerasan untuk mengamankan masyarakat sipil. Pernyataan ini akan diperkuat pada bagian konteks, di mana saat Orde Baru, Presiden Soeharto mengembangkan proyek militerisasi dan memelihara pretorianisme militer (ABRI) untuk mempertahankan *status quo* (Eko, 2003: 297). Hal ini dijelaskan juga dalam studi Dkahidae (2003: 251—257) terkait militer Indonesia: *Pertama*, klaim bahwa ABRI sudah lahir sejak 5 Oktober 1945 di mana harilah tersebut adalah hari lahir TKR (Tentera Keamanan Rakjat) yang identik dengan perjuangan melawan Jepang. Padahal sebenarnya ABRI dalam pemaknaan Orde Baru belum lahir pada hari itu. *Kedua*, mendramatisasi hari kelahiran ABRI dengan mendekatkannya pada momentum proklamasi yang sengaja dibuat secara *ex post factum*. *Ketiga*, pengambil-alihan diskursus politik secara transhistoris bagi peran militer dengan dasar bahwa yang ada pada waktu perjuangan adalah para laskar dan pejuang yang pada waktu itu terhimpun dalam ABRI dan serta merta mendiskreditkan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kealpaan serangan dari luar, melemahkan peran ABRI. Karena itu, mereka diarahakan, alih-alih untuk mengatasi kekacauan dalam negeri, tetapi kemudian melanggengkan kekuasaan militer.

Oleh karena itu, dengan doktrin dwi-fungsi ABRI, militer menguasai semua lini kehidupan dan mengeklaim dirinya punya citra mesianistik yang melakukan “tugas suci” sebagai integrator, stabilisator, dan dinamisator (Eko, 2003: 297). Dilengkapi dengan jenis ideologi seperti Partai Golongan Karya (Golkar), ABRI menikmati hak-hak istimewa dan leluasa mengakses sumber daya politik-ekonomi,

sebab Golkar adalah ABRI dalam wajah sipil, dan ABRI adalah Golkar dalam wajah militer. Semua organisasi semi-militer yang dibentuk di kalangan militer adalah Golkar, demikian sebaliknya (Dhakidae, 2003: 262).

Keberhasilan militer di tingkat pusat membuat jenderal A.H. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat, membangun dan meningkatkan kekuatan politik di daerah dengan memusatkan kekuatan militer, administrasi dan politik dalam tangan komando-komando teritorial. Indonesia Timur masuk dalam daerah militer VII. Di setiap pulau di Kepulauan Sunda Kecil—termasuk NTT—dipimpin oleh seorang letnan yang berasal dari kelompok suku lokal, serta menempatkan perwira asal penduduk lokal sebagai pimpinan militer untuk mencegah timbulnya rasa ketidakpuasan dari penduduk lokal (Klinken, 2015: 252). ABRI berusaha menduduki posisi sentral dalam pembangunan desa dengan meluncurkan satu kebijakan bernama “ABRI Masuk Desa”. Program ini bertujuan mendorong pembangunan, mempertahankan posisi sentral ABRI, mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Kelompok-kelompok prajurit memperbaiki jembatan dan sumur, membetulkan jalan, membangun rumah-rumah ibadah dan klinik kesehatan, serta yang tak kalah penting: melakukan indoktrinasi pancasila (Ricklefs, 2008: 605).

Namun Klinken (2015: 253) menjelaskan bahwa mengakarnya militer di tingkat provinsi menyebabkan ketidakmampuan militer tingkat pusat membayar pasukannya secara wajar. Keadaan ini memaksa para aparat di tingkat lokal membentuk persekutuan dengan kelompok pengusaha lokal. Situasi ini dalam beberapa hal menjadi alasan aparat keamanan—di tingkat lokal pada khususnya—

melancarkan serangkaian tindak kekerasan, pelanggaran HAM, merajalelanya KKN, kematian kebebasan, dan mandulnya peran masyarakat sipil (Eko, 2003: 297).

Selain itu, konteks kekerasan Sersan Ipi dapat disorot dengan penjelasan Yosie Polimpung, peneliti isu keamanan dari *Associate Chair* Puskamnas Universitas Bhayangkara, Jakarta—dalam wawancaranya dengan IndoProgress.com—mengemukakan bahwa pembahasan terhadap polisi tidak bisa lepas dari isu Praetrorianisme Dunia Ketiga, yaitu bagaimana kultur militerisme masih ada di tubuh Polri. Negara-negara pasca-kolonial atau negara Dunia Ketiga menempuh kemerdekaan dengan jalan militer. Karena itu, pihak-pihak yang berperang dan “membebaskan” negaranya dari penjajah merasa bahwa mereka lebih memiliki andil daripada masyarakat sipil. Jadi, terlihat jelas bagaimana militer masuk menyeruak ke dunia politik karena merasa memiliki tanggung jawab menjaga kemerdekaan (<https://indoprogress.com/2022/01/kaum-progresif-harus-punya-agenda-reformasi-kepolisian/>).

Tabel Analisis 5.4

Teks	Para pejabat menikmati tarian dan semua penyambutan itu dengan terkagum-kagum, seolah mereka berasal dari belahan bumi yang lain dan belum pernah melihatnya. Seseorang mengambil sepotong <i>lakutobe</i> dan berkata ya Tuhan, saya rindu sekali makanan ini, ini adalah makanan masa kecilku. Yang lain berkata, ya, kadang-kadang kita harus menikmati makanan lokal seperti ini, sebagai hiburan dan	Gaya tutur satire dan menggunakan koherensi sebab-akibat.
-------------	---	---

	ingatan akan masa lalu kita; tetapi jangan terlalu sering, sebab makanan ini hanya akan membuat kita menjadi bodoh dan kampungan. (Hal. 83—84)	
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Mencintai budaya Timor termasuk pangan lokal dan memiliki rasa antipati terhadap pejabat yang notabene kelas sosial atas dan sering menganggap remeh kelas bawah, serta seing menindas
Konteks Sosial	Birokrasi dan krisis ekonomi masa Orde Baru dalam kaitannya dengan pangan lokal	Krisis anjloknya harga minyak bumi di pasar internasional yang terjadi pada tahun 1981, 1982, dan 1986, yang berdampak buruk pada pemasokan negara telah menjadi momen yang secara perlahan mengubah wajah perekonomian Indonesia. Krisis itu sendiri mengakibatkan sejumlah donor internasional melakukan desakan kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan paket deregulasi ekonomi yang kemudian berdampak pada monopoli dan kelaparan.

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, gaya tutur yang digunakan adalah gaya satire dan koherensi sebab-akibat. Satire adalah ungkapan menertawakan atau menolak sesuatu dengan cara yang

etis dan estetis (Keraf, 2010: 144). Dengan gaya bahasa demikian yang sebagai pengarang, Felix menunjukkan skema dirinya—kognisi sosial—bahwa ia tidak menyukai pejabat-pejabat yang angkuh, menganggap remeh kelas bawah, dan suka menindas. Pada tataran konteks sosial, pembahasannya masih berkaitan dengan penjelasan mengenai situasi pangan lokal pada periode Orde Baru, di mana masyarakat diinstruksikan untuk mengonsumsi beras agar “lebih beradab” dalam bahasa Felix. Namun yang sebenarnya ingin dilihat dari teks ini terkait proses terbentuknya oligarki masa Orde Baru. Wiratama, dalam pengantar untuk buku Hadiz (2005: xx) mengemukakan bahwa proses terbentuknya oligarki dalam hubungannya dengan tumbuhnya kekuatan kapitalis domestik di Indonesia diklasifikasikan dalam dua tahap yakni pada era awal 70-an dan era awal 80-an, di mana negara merupakan pelaku utama yang menggerakkan seluruh sendi ekonomi nasional.

Memanfaatkan “kebaikan hati” negara melalui berbagai lisensi, kontrak, kredit, dan pasokan, bibit-bibit oligarki mulai terbentuk. Namun krisis anjloknya harga minyak bumi di pasar internasional yang terjadi pada tahun 1981, 1982, dan 1986, yang berdampak buruk pada pemasokan negara telah menjadi momen yang secara perlahan mengubah wajah perekonomian Indonesia. Krisis itu sendiri mengakibatkan sejumlah donor internasional melakukan desakan kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan paket deregulasi ekonomi (Hadiz, 2005: xx).

Namun, studi Hadiz juga membuktikan bahwa deregulasi yang mulanya dimaksudkan untuk menghilangkan praktik-praktik monopoli negara atas berbagai sumber daya yang berorientasi pada pasar liberal tersebut gagal diwujudkan, karena

penikmat dari deregulasi tersebut tidak lain adalah kaum oligarki. Oleh karena itu, bukannya meliberalkan pasar, deregulasi ekonomi justru memuluskan jalan bagi pemindahan monopoli negara atas akses sumber daya ke tangan para oligarki. Dengan demikian, kelas oligarki yang sebelumnya dipupuk oleh kekuasaan dan otoritas negara atas berbagai sumber daya, kini justru berbalik menjadi perampas akses negara (Hadiz, 2005: xxi).

Berhubungan dengan itu, Dhakidae (2003: 230) menilai pemerintahan birokratik dan teknokratik menjadi satu, tak terpisahkan. Militer dan teknokratik dipakai oleh sebuah sistem dan modal yang sama. Kemudian rezim Orde Baru meniadakan mobilisasi massa dengan bersandar pada kebijakan deparpolisasi dan depolitisasi. Dengan masuknya faktor modal mulai menentukan Orde Baru dalam revolusi kapitalis di wilayah pedesaan dengan memasifkan keterlibatan petani dan pertanian ke dalam moda produksi kapitalis. Pupuk yang mengharuskan petani mulai menggunakan ekonomi tunai membuat para petani mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar utang. Demi membayar utang-utang mereka, banyak petani yang melepaskan tanahnya dan terjadi rekonsiliasi kepemilikan tanah oleh orang-orang kota atau kaum pemodal (Dhakidae, 2003: 235).

Karena itu, bagi Robison (2012: 127) pemerintah Orde Baru menjadi eksekutor tatanan kolonial baru, yang ditandai dengan tujuh bom waktu: *Pertama*, demoralisasi nasional sebagai akibat bangunan trio: avonturir, cukong, dan pejabat. *Kedua*, ruwetnya birokrasi dan bisnis. *Ketiga*, kebijakan pemerintah tentang kredit bank. *Keempat*, perusakan hutan dan sumber daya alam lainnya. *Kelima*, pengusiran

rakyat dari tanah mereka dengan “feodalisme uang”. *Keenam*, kolonialisme ekonomi.

Ketujuh, meningkatnya angka pengangguran.

Tabel Analisis 5.5

Teks	Am Siki memandang mereka dengan heran dan bertanya bagaimana bisa orang terhormat tidak memahami syair. Padahal ia telah berkata dengan diksi dan metafora yang bisa dipahami oleh orang Timor yang paling tolol sekalipun. Am Siki berkata dengan gusar: “Bawalah dia, Tuan-tuan. Jadikan ia seorang <i>kase</i>, seperti kalian. Dia bukan milik leluhur dan tidak boleh mati di naungan lontar. Tapi namanya adalah Oetimu, maka biarkan ia tinggal di kampung ini. Saya telah berbicara dengan telanjang, dan dari dalam kubur, belulang saya akan mengingatnya.” (Hal.84—85)	Dari segi kebahasaan, kalimat dikembangkan dengan gaya bahasa sinisme dan hiperbola.
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Felix menyukai syair-syair atau pantun-pantun dari daerah Dawan. Bagi Felix, itu cara berbahasa yang terhormat dan menyayangkan pemerintah yang tidak memahami bahasa-bahasa adat tersebut, dan hanya menjadikannya sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan politik.
Konteks Sosial	Masyarakat Timor yang senang berkomunikasi dengan bahasa-bahasa kiasan	Dalam masyarakat Dawan, terdapat pantun adat seperti <i>naton</i> dan <i>takanab</i> yang biasa digunakan dalam acara penjemputan tamu kehormatan, panen dan ritual keagamaan. Tetapi

		dalam novel digunakan untuk menjemput tamu kehormatan. <i>Natoni</i> memiliki arti yang sangat kaya dan mendalam. <i>Natoni</i> dan <i>Takanab</i> mengandalkan permainan bunyi dan intonasi yang khas, dengan sejumlah majas.
--	--	--

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Dari segi teks, bahasa yang digunakan pengarang adalah sindiran dan ejekan yang menggunakan majas sinisme, dibubuhi dengan majas hiperbola. Sementara pada tataran kognisi sosial, menggambarkan Felix yang menyukai syair-syair atau pantun-pantun dari daerah Dawan. Bagi Felix, itu cara berbahasa yang terhormat dan menyayangkan pemerintah yang tidak memahami bahasa-bahasa adat tersebut, dan hanya menjadikannya sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan politik. Hal ini dibuktikan dalam tataran konteks. Studi Ragat, dkk. (2019) memaparkan bahwa *Natoni* memiliki aspek bunyi, aspek metrik, dan kekayaan majas sehingga mengandung unsur puitis yang indah. Disertai dengan penjelasan tentang semiotika, studi Ragat, dkk, menjelaskan bahwa *Natoni* memiliki nilai sastra yang tinggi dan sangat sayang jika tidak dilestarikan dan alpa dari perhatian pemerintah.

Di balik semua itu, yang ingin ditilik secara detail adalah penggunaan bahasa saat Orde Baru. Anderson dalam Dhakidae (2003: 383) mengemukakan bahwa

bahasa Indonesia dalam perkembangannya, tidak lagi soal perkembangan linguistik, tetapi perkembangan bahasa dalam kaitannya dengan politik nasional Indonesia. Bahasa Indonesia yang menang tetapi kalah, bahasa Jawa yang kalah tetapi menang dalam persaingannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa meng-*krama*-nisasikan bahasa Indonesia, me-*ngoko*-kan bahasa Indonesia secara tidak langsung. Karena itu, yang terpenting adalah bukan soal masuknya bahasa Jawa secara kentara ke dalam bahasa Indonesia, tetapi *Javanese modality* yang jauh-jauh lebih penting karena dengan itu, perubahan yang terjadi dalam bahasa Indonesia hampir tergantung sepenuhnya pada apa yang terjadi dengan bahasa Jawa.

Namun yang ingin dilihat adalah bukan soal mana yang menang, tetapi lebih berfokus pada efek yang ditimbulkan, terutama terkait strategi politik yang kemudian mendiskreditkan bahasa-bahasa daerah lain. Dengan kata lain, pengguna bahasa Indonesia lebih beradab daripada pengguna bahasa daerah, terutama daerah-daerah pinggiran.

Tabel Analisis 5.6

Teks	Keeseokan harinya, apa yang ia lakukan menjadi berita utama paling mengharukan sepanjang tahun, dan karena kemuliaan hatinya, ia disebut Muder Teresa dari Timor. “Sesudah Dicopet, Muder Teresa dari Timor Menyantuni Anak Pencopet yang Piatu.” Kira-kira begitulah koran menulisnya. Foto Muder Teresa yang sedang memeluk dan memberikan segepok uang kepada Silvy menjadi sangat viral,	Menggunakan gaya satire dan hiperbola
-------------	--	---------------------------------------

	dimuat di koran-koran, ditayangkan di TVRI dan dideskripsikan dengan baik oleh para penyiar radio. Di pemilihan umum berikutnya, Muder Teresa itu terpilih menjadi anggota legislatif, mengikuti suaminya. (Hal. 102)	
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Antipati Felix terhadap oligarki, yang nepotisme dan dan haus akan kekuasaan. Mengandalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, dan memperjuangkan keluarganya untuk juga masuk dalam lingkaran kekuasaan. Pada titik ini bisa disebut, monopoli kekuasaan sehingga oligarki tumbuh subur.
Konteks Sosial	Praktik berpolitik di Indonesia saat Orde Baru dan beberapa tahun terakhir (2018—sekarang) di NTT	Posisi media saat Orde Baru menjadi locus terjadinya hubungan yang erat antara ekonomi dan kekuasaan, kekuasaan dan bahasa, bahasa dan ekonomi. Menggambarkan. Selain itu per 2018 tercatat ada lima istri pejabat dan mantan pejabat di NTT yang maju sebagai anggota legislatif di tingkat pusat.

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, kalimat yang digunakan dalam kutipan ini mengusung satu tema besar tentang penggunaan media dan relasinya dengan pemimpin, yang dituturkan

dengan gaya satire dan hiperbolis, sedangkan pada tataran kognisi sosial mengilustrasikan keresahan Felix sebagai pengarang terhadap cara kerja oligarki yang selalu nepotisme dengan mengandalkan segala cara untuk tetap eksis di kursi jabatan. Pada titik ini, jika ditilik dimensi konteks sosialnya, maka akan terkait dengan pembahasan analisis sebelumnya, kajian Dhakidae (2003: 404) menjelaskan bahwa pada zaman Orde Baru terjadi hubungan yang erat antara ekonomi dan kekuasaan, kekuasaan dan bahasa, bahasa dan ekonomi. Karena ikatan erat tersebut, tak ada pemisahan yang ketat antara ketiga unsur tersebut.

Lebih lanjut, Dhakidae juga menjelaskan bahwa penggunaan akronim, eufemisme, dan disfemisme dalam media (pers) Orde Baru sangat ditentukan oleh penguasa. Penguasa Orde Baru yang berhak menentukan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang boleh dikonsumsi oleh publik dan mana yang tidak boleh diketahui oleh khalayak. Disfemisme cacat hukum menumpahkan darah, eufemisme memperhatikan aspirasi bisa berubah menjadi berbahaya, dan akronim bisa menyeret seorang aktivis ke pengadilan. Dalam hal ini, menjadi jelas bahwa kekuasaan yang berhak mengontrol mana bahasa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang (Dhakidae, 2003: 442).

Apabila penjelasannya difokuskan pada situasi pers saat kontestasi pemilu saat Orde Baru, penjelasan tentang koran *Indonesia Raya* dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami konteks pers di masa Orde Baru. Oleh karena itu. Pada pemilihan umum tahun 1971—yang merupakan pemilihan umum kedua selama sejarah bangsa Indonesia dan pemilihan umum pertama di zaman Orde Baru—

dijelaskan tentang bagaimana pergeseran sikap yang terjadi dalam koran *Indonesia Raya*. Awalnya, *Indonesia Raya* memberikan dukungan penuh terhadap Golkar, yang diharapkan dapat memenuhi janjinya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga isu tentang kelompok golput dikecam oleh Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi media ini. Namun ketika mengetahui adanya praktik-praktik kecurangan dan ketidakwajaran dalam kemenangan Golkar, maka *Indonesia Raya* berubah sikap. Bagi Mochtar Lubis, kenyataan tersebut merupakan akhir dari “bulan madunya” dengan Orde Baru (Haryanto, 2006: 92).

Ekonomi politik media massa saat Orde Baru sangat memperhatikan karena terjebak dalam kepentingan dikotomis antara kepentingan mana yang mesti diprioritaskan. Media massa saat itu terjebak dalam kepentingan ekonomi politik dan mesti terus beradaptasi dengan era penguatan dan sentralisasi militer dalam perkembangan kekuatan ekonomi negara (Haryanto, 2006: 76). Terlihat jelas bahwa media massa di era Orde Baru adalah pergulatan antara dominasi dan resistansi, diskursus kekuasaan di mana bahasa menjadi intisari permainan. Bahasa mengatur taktik dan strategi, menentukan mana pihak yang menang dan mana pihak yang kalah (Dhakidae, 2003: 439).

Konteks dari teks ini juga dapat dipahami dengan informasi penting terkait pasangan pejabat di NTT yang saling mendukung dalam perebutan kursi di tingkat pusat. Pada tahun 2018, media *online VoxNtt.com* mencatat terdapat lima istri pejabat dan mantan pejabat NTT yang ikut dalam bursa caleg DPR RI dan DPD RI. *Pertama*, Ratu Wulla, istri Bupati Sumba Barat Daya, Markus Talu, yang maju sebagai calon

DPR RI dari Dapil II NTT. *Kedua*, Lusia Lebu Raya, istri mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, maju sebagai calon DPD RI Dapil NTT nomor urut 41. *Ketiga*, Julie Sutrisno Laiskodat, istri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang bertarung di pemilihan caleg DPR RI Dapil I NTT. *Keempat*, Kristina Muki, istri dari Bupati Timor Tengah Utara, Ray Fernandes, yang maju sebagai caleg DPR RI. *Kelima*, Hilda Manafe, istri Wali Kota Kupang, Jeffry Riwu Kore, maju sebagai caleg DPD RI Dapil NTT nomor 34 (<https://voxntt.com/2018/11/05/suami-jadi-modal-ini-5-istri-pejabat-dan-mantan-pejabat-ntt-yang-ikut-caleg-36275/>).

Tabel Analisis 5.7

Teks	Sebab sejak komunis diumumkan sebagai musuh negara, agama telah dijadikan sebagai penuntun kehidupan, maka Maria dan kawan-kawannya menyebut kelompok mereka sebagai kelompok doa. Mereka punya nama yang bagus, Kelompok Doa Mahasiswa Ora et Labora. Setiap kali berkumpul, mereka selalu membawa alkitab dan rosario, sehingga jika ada terduga intel yang tahu-tahu ikut nimbrung bersama mereka, mereka tidak membicarakan apa-apa, selain berdoa, membaca alkitab dan memuliakan nama Tuhan. Pernah ada seorang anak yang suka iseng berpura-pura kerasukan Roh Kudus dan mengolok-olok tentara, tetapi di jalan pulang ia diserempet oleh mobil yang tidak dikenal. Kakinya patah dan anak-anak yang menganggap keisengan itu tidak lucu lagi. Mereka harus membuat kelompok doa mereka menjadi lebih meyakinkan lagi. Untuk itu mereka membuat jadwal doa seminggu sekali dan	Menggunakan koherensi “sebab-akibat” dan menggunakan detil atau latar belakang dari sebuah peristiwa
-------------	---	--

	mencari seorang pendamping rohani. Berdoa seminggu sekali tidak akan merugikan mereka, malah baik untuk memohonkan turunnya roh kudus di atas kepala Soeharto. (Hal.127—128)	
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	sering terlibat dalam demonstrasi ketika kuliah di Jawa dan memiliki kepedulian dan empati terhadap kaum kelas bawah yang tertindas
Konteks Sosial	Situasi pergerakan mahasiswa Indonesia di era Orde Baru	Tiga aliran gerakan mahasiswa di masa itu, yakni kubu konservatif-kooperatif, kubu aktivis mahasiswa beraliran kultural-reaksioner, dan kubu mahasiswa progresif-radikal

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, bahasa yang digunakan dikembangkan dengan metode koherensi “sebab-akibat” dan menggambarkan detail atau latar belakang dari sebuah tindakan atau peristiwa. Sementara pada bagian kognisi sosial, dijelaskan dengan situasi Felix saat berkuliah di Malang. Felix sering terlibat dalam diskusi dan aksi/demonstrasi di jalan, menyuarakan suara-suara rakyat kecil yang diabaikan dan sering mendapatkan tindak ketidakadilan dari pemerintah. Pada bagian konteks sosial, akan dijelaskan tentang situasi pergerakan mahasiswa dalam menentang Soeharto. Sejak awal 1970-an, mulai muncul pergerakan menentang otoritas Soeharto dan memanas di tahun 1980-an. Tetapi, pergerakan itu dibayang-bayangi oleh tindakan represi oleh militer

dan antek-anteknya. Dewan mahasiswa mandek dan larangan permanen diterapkan bagi aktivitas politik kampus. Birokrasi kampus diberikan hak yang lebih leluasa untuk mencampuri aktivitas mahasiswa. Secara kolektif, kebijakan ini disebut Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), sebagai perwujudan korporatisasi rezim otoritarian Orde Baru terhadap mahasiswa (Eko, 2003: 177).

Kebijakan NKK dan BKK mendepak aktivisme mahasiswa dari *mainstream* kehidupan politik Indonesia. Yampolsky dalam IndoProgres.com menulis bahwa di kampus dimasukkan mata kuliah kewiraan, di mana Resimen Mahasiswa (Menwa) yang diam-diam mengawasi aktivitas mahasiswa sehingga disebut “penghijauan kampus” atau “militerisasi kampus” (<https://indoprogress.com/2015/01/militerisme-dan-kita-di-tahun-tahun-orba/>).

Ringkasnya, selama tahun 1980-an, sukar bagi mahasiswa kritis untuk berorganisasi secara terbuka di kampus. Segelintir mahasiswa kemudian aktif dalam komunitas-komunitas miskin, bekerja untuk NGO-NGO yang mulai mempertanyakan paradigma yang telah mendominasi pemikiran pembangunan. Sebagian lainnya terlibat dalam kelompok-kelompok studi yang menjamur di sekitar kampus utama.

Studi Eko (2003: 179—181) mengidentifikasi tiga aliran gerakan mahasiswa di masa itu: *Pertama*, kubu konservatif-kooperatif yang tergabung dalam Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Ideologi kubu ini didasari pada realitas politik di luar kampus yang sangat represif yang tidak mungkin dilawan dengan aksi di jalanan. *Kedua*, kelompok aktivis mahasiswa beraliran kultural-reaksioner yang

aksinya hanya soal isu-isu keagamaan dan meniadakan realitas politik. *Ketiga*, kelompok mahasiswa progresif-radikal yang membidani gerakan populis-kerakyatan “kekirian” di bawah *platform* sosial-demokratik. Kelompok ini diisi oleh tiga kelompok kategorial, yakni LSM-LSM yang sibuk dengan program pendidikan hukum, kelompok yang menganggap buruh sebagai pilar utama gerakan politik kerakyatan, dan kelompok aktivis di medan buruh yang aktif dalam gerakan mahasiswa “parlemen jalanan”.

Eko (2003: 177) menuliskan bahwa dari awal 1989, demonstrasi publik oleh aktivis mahasiswa menjadi kebiasaan, hampir setiap hari terjadi di kota-kota universitas utama Jawa. Sebaran isu kebanyakan mengenai pelanggaran hak asasi, khususnya pembatasan hak berorganisasi di kampus, penangkapan aktivis-aktivis mahasiswa, dan kesewenang-wenangan dalam penyerobotan tanah. Walaupun protes-protes tersebut mampu menarik massa yang relatif besar, tetapi tidak berhasil mendapatkan dukungan riil dari masyarakat sipil. Gerakan mahasiswa malah dikecam oleh pimpinan perguruan tinggi dan mesti berhadapan dengan tangan-tangan baja militer. Pemerintah menganggap kebangkitan mahasiswa sebagai ancaman bagi ketenangan politik masyarakat (Eko, 2003: 178). Keadaan ini direspons pemerintah dengan tindakan yang represif. Beberapa aktivis kelompok diskusi ditangkap, diinterogasi, dan dipenjarakan.

Tak hanya itu, para mahasiswa yang bersikukuh untuk mengkritik sistem pemerintah Soeharto akan hilang atau ditembak lalu dibuang ke jalanan. Kroef dalam Wilson (2015: 94) menjelaskan bahwa semua proses penembakan mulanya ditelusuri

oleh polisi kemudian daftarnya diberikan kepada militer atau suruhan militer, untuk menyusun daftar tembak. Peristiwa penembakan kemudian disusul dengan ketidakjelasan siapa yang sebenarnya menjadi dalam pembunuhan misterius tersebut. Karena itu pers menjuluki para pelaku penembakan dengan Petrus (penembakan misterius) (Wilson, 2015: 95).

Tabel Analisis 5.8

Teks	Suatu hari Maria menyela: “Wahai Frater, bagaimana kalau Tuhan adalah Mahamurah, tetapi setiap pemberiannya selalu diambil oleh orang-orang yang serakah?” “Maria, Maria,” katanya. “Engkau terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Bukankah burung pipit tidak menabur, tetapi tidak pernah pula ia mati kelaparan? Tuhan telah mengatur semuanya. Sejak dunia ini diciptakan, Tuhan telah...” “Frater, bukankah burung pipit yang tidak menabur tetapi menuai itu hanya menyusahkan petani? Bukahkah mereka adalah perampok?” katanya. “Mereka diberi makan oleh Tuhan.” “Mereka adalah perampok kecil yang dilindungi oleh Tuhan. Dasar bajingan!” (Hal. 128—129)	Pengembangan bahasa menggunakan dialog antartokoh dengan penyajian pernyataan antartokoh yang saling kontradiktif. Sintesis tokoh Frater Yosef diserang oleh antitesis tokoh Maria.
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Seorang ex frater yang tidak menyukai kebisuan agama di hadapan berbagai ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil. Bentuk antipati Felix terhadap para klerus yang lebih cenderung memihak kelas atas ketimbang kelas bawah

Konteks Sosial	Kondisi agama pada masa Orde Baru	Orde Baru menjadi produsen rumah ibadah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apabila diperiksa KTP, hampir tidak ada satu pun kartu yang tidak menunjukkan agama pemegangnya. Agama menjadi perumus identitas, bahkan menjadi identitas itu sendiri.
-----------------------	-----------------------------------	---

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, pengembangan bahasa menggunakan dialog antartokoh dengan penyajian pernyataan antartokoh yang saling kontradiktif. Tesis tokoh Frater Yosef diserang oleh antitesis tokoh Maria. Dialog-dialog itu dibubuhi dengan pernyataan-pernyataan satire dan sarkas. Karena itu, pada tataran kognisi sosial, melukiskan posisi Felix sebagai seorang ex-frater yang tidak menyukai kebisuan agama di hadapan berbagai ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil. Selain itu, teks ini juga merupakan bentuk antipati Felix terhadap para klerus yang lebih cenderung memihak kelas atas ketimbang kelas bawah.

Pada konteks sosial dapat dijelaskan dengan menghubungkannya dengan peran agama waktu Orde Baru. Bagi Dhakidae (2003: 513) Orde Baru menjadi produsen rumah ibadah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apabila diperiksa KTP, hampir tidak ada satu pun kartu yang tidak menunjukkan agama pemegangnya. Agama menjadi perumus identitas, bahkan menjadi identitas itu sendiri. Agama

menjadi diskursus, medan pertandingan antara beberapa rezim kebenaran yang dibela agama masing-masing yang mungkin tidak berjalan normal, yang satu lebih berkuasa dari yang lain, karena dukungan modal dan dukungan kekuasaan negara dan institusi sosial lainnya.

Dalam kaitannya dengan ideologi, Dhakidae (2003: 538—541) menemukan tiga temuan, yakni: *Pertama*, agama direduksi menjadi *social fact*. Karena itu, agama secara primordial senantiasa hadir sebagaimana seseorang hanya lahir untuk menjadi milik suatu bangsa, ras, dan agama tertentu. Agama menjadi *the second nature* dari siapa pun. *Kedua*, seseorang bukan berada dalam bentuk abstrak akan tetapi manusia milik dunianya. Dalam hubungan ini, masyarakat dan negara hampir tidak bisa dipisahkan dari agama. Ketika negara mengambil bagian dan menempatkan dirinya di atas masyarakat, maka biasanya mengambil sebagian besar wewenang yang sedianya hanya milik agama sebegitu rupa sehingga negara mengatur agama itu sendiri. *Ketiga*, dimensi eskatologis. Eskatologi—doktrin tentang akhirat—adalah suatu istilah khas yang lebih menunjukkan sesuatu yang “akhir” dan hampir semua agama menafsirkannya sebagai akhirat, di kala semesta kembali kepada ketiadaan.

Semua itu hanya mau mengatakan bahwa kondisi-kondisi penindasan dan kekerasan di masa Orde Baru membangkitkan khayalan-khayalan keselamatan di akhir namun khayalan-khayalan itu memaksa suatu keputusan. Hal itu kemudian menjadi sebuah letupan untuk melihat agama sebagai lembaga kekuasaan dan ideologi azali—yang berfungsi kritik terhadap pembenaran kekuasaan, eskatologis—untuk memeriksa Orde Baru. Penjelajahan politik di sini adalah memeriksa agama

sebagai diskursus dalam pengendalian *politics of exclusion*, memeriksa lembaga pengendali dan penafsir agama dalam pergaulannya dengan sesuatu di luarnya (Dhakidae, 2003: 553).

Tabel Analisis 5.9

Teks	“Biaya <i>study tour</i> untuk si calon sarjana naik lagi bulan ini.” Iparnya itu tidak jadi meminta uang sumbangan, dan tidak juga bertanya apa itu <i>study tour</i>, sebab takut disangka tidak berpendidikan, meski sebenarnya ia memang tidak pernah mengecap bangku sekolah. ... Dengan wajah murung bercampur bangga ayah Linus menjawab: “Surat dari calon sarjana kita baru tiba kemarin. Biaya <i>praktikum non laboratory</i> naik dua kali lipat bulan ini.” Orang-orang tidak bertanya apa arti dari istilah aneh itu, sebab tidak ingin dibilang bodoh. Namun masing-masing mereka mulai mengeluhkan biaya pendidikan anaknya, lengkap dengan beragam istilah asing dan harganya sendiri-sendiri. Semakin asing dan semakin susah istilah itu, semakin mahal pula harganya. Seseorang lalu menyesalkan dengan gerutu, mengapa untuk disebut terpelajar, mereka harus membayar sangat mahal untuk istilah-istilah asing. “Apa pula gunanya istilah asing itu? Apakah bisa dimakan? Apakah bisa membuat hujan turun teratur?” Orang banyak mengangguk-angguk dan mengiyakan. “Ah, dasar kalian anak orang kampung,” ayah Linus menyergah. “Istilah asing itu akan membuat anak kita lulus dari universitas. Jika telah lulus, ia akan mendapatkan title sarjana. Dengan titel	Gaya tutur dalam teks ini menggunakan gaya satire dan inuendo. Selain itu kalimat yang dibangun menggunakan gaya klimaks.
--------------------	--	--

	sarjana, ia bisa lebih gampang bekerja dan mendapatkan gaji bulanan.” Orang banyak mengangguk-angguk, menyetujui penjelasan ayah Linus dan tidak menyetujui orang tadi. Tapi si orang tadi mendebat, katanya: “Kita mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan titel sarjana, lalu menggunakan titel sarjana itu untuk kembali mencari uang. Betapa bodohnya kita.” Orang banyak tertawa dan kembali menyetujui orang tadi. “Nah, bukankah kau bilang betapa bodohnya kita?” Ayah Linus berkata. “Karena kita sangat bodoh, kita wajib menyekolahkan anak-anak kita, agar mereka tidak menjadi bodoh sama seperti kita.” (Hal. 138—139)	
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Situasi Felix di kampungnya di mana banyak sekali orang tua yang mesti menjual tanah, hewan, berutang hanya untuk menyekolahkan anak mereka. Ia juga tidak menyukai sekolah yang terlalu bersifat ekonomis, yang menuntut bayaran mahal tetapi tidak ada peningkatan mutu. Lebih-lebih ia tidak menyukai sistem pendidikan di Indonesia.
Konteks Sosial	Pendidikan di NTT di masa Orde Baru	Kuatnya birokrasi sehingga menguasai semua lini kehidupan, termasuk dunia kerja, dan pendidikan sebagai permulaannya. Yang ditekankan adalah mahalnya biaya pendidikan yang masyarakat kecil yang dieksploitasi sehingga tidak cukup untuk

		membiayai pendidikan anak-anak mereka. Alhasil, banyak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah bersekolah.
--	--	---

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, kalimat yang dikonstruksi disiasati dengan gaya satire dan inuendo. Inuendo adalah sindiran yang mengecilkan kenyataan yang sebenarnya (Keraf, 2010: 144). Gaya bahasa inuendo dalam teks, misalnya: *“Kita mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan titel sarjana, lalu menggunakan titel sarjana itu untuk kembali mencari uang. Betapa bodohnya kita.”* Kemudian dari konstruksi kalimat yang dibangun, hendak mencapai sebuah gradasi atau klimaks tertentu. Sementara pada tataran kognisi sosial, melukiskan situasi Felix di kampungnya, di mana banyak sekali orang tua yang mesti menjual tanah, hewan, berutang hanya untuk menyekolahkan anak mereka. Ia juga tidak menyukai sekolah yang terlalu bersifat ekonomis, yang menuntut bayaran mahal tetapi tidak ada peningkatan mutu. Lebih-lebih ia tidak menyukai sistem pendidikan di Indonesia.

Pada tataran konteks sosial, dapat disorot dengan hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika disiarkannya pidato Theodore Schultz berjudul *“Investement in Human Capital”*. Pidato di hadapan *The American Economic Association* tersebut merupakan peletak dasar teori *human capital modern*. Pesan utama dari pidato

tersebut adalah proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan sebuah bentuk konsumsi semata-mata, tetapi juga merupakan suatu bentuk investasi (Widiansyah, 2017: 207).

Karena itu, Vizey dalam Widiansyah (2017: 210) menyatakan ukuran yang paling populer dalam melihat peranan ekonomi adalah mempertautkan relasi antara ekonomi dan pendidikan. Argumen ini memiliki dua aspek, yakni: *Pertama*, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern. *Kedua*, pendidikan dapat menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, *human capital* percaya bahwa semakin banyak manusia—tenaga kerja—maka produktivitas semakin tinggi

Namun, di lain sisi pandangan tersebut mengabaikan banyak hal, apalagi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Paradigma tersebut dikritik dengan tiga poin: *Pertama*, mempersiapkan manusia untuk menjadi kelas pekerja yang tunduk kepada kapitalisme dan terus didominasi. *Kedua*, kehancuran yang tak terelakan pada kelas menengah ke bawah. *Ketiga*, eksploitasi dan penundukkan komersial atas kelas-kelas borjuis.

Di NTT, masa Orde Baru, gambaran pasar lapangan kerja di kota didominasi oleh pemerintah dan perdagangan, yang berbeda sekali dengan daerah pinggiran yang ekonominya hanya bersifat untuk bertahan hidup saja bahkan mengalami kemunduran. Bila melihat birokrasi masa itu, yakni adanya patron antara pemerintah dan elite lokal, maka dapat dikatakan dikuasai oleh orang-orang berpendidikan.

Nyatanya sampai tahun 1973, pendidikan masih dikuasai oleh sekelompok penduduk di NTT. Karena itu, Klinken (2015: 173) mencatat hanya 1,5% dari laki-laki dan perempuan yang tamat SMP, dan hanya 0,2% yang tamat SMA.

Apabila ditarik penjelasannya ke beberapa tahun setelahnya, yakni tahun 2009, Setiawan (2014: 66) mencatat sekitar 70% penduduk Provinsi NTT umumnya hanya berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang belum/tidak sekolah 39,77%, tamat SD 31,20%, tamat SMP 12,13%, tamat SMA umum dan kejuruan 13,17%, bahkan masih ada sebanyak 10,34% penduduk NTT yang buta huruf.

Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa meskipun sarana dan prasarana pendidikan di NTT cukup memadai, namun realitasnya masih banyak yang tidak berpendidikan. Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan di NTT adalah biaya pendidikan yang mahal. Ekonomi orang tua yang terbatas menjadi alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya, apalagi ke jenjang perguruan tinggi (Setiawan, 2014: 84). Karena itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang mestinya membebaskan, justru menjadi medan penguasaan kelas, medan dominasi, dan pelanggaran praktik ketidakadilan.

Tabel Analisis 5.10

Teks	Iring-iringan itu berhenti. Beberapa orang menyumpah-nyumpahi penduduk sipil yang tidak hati-hati berkendara. Timor Timur sedang memanas. Tentara sedang terburu-	Gaya bahasa yang digunakan adalah satire dan sarkasme dan juga makna dalam teks tidak
-------------	---	---

	buru karena perang. Seharusnya penduduk sipil minggir jika melihat unimog. ... “Hadirin dan hadirat yang terhormat, sidang perkabungan yang saya muliakan,” katanya membuka pidatonya. “Republik ini berduka, sebab dalam usahanya mempertahankan keutuhan negara kesatuan, ia terus kehilangan ksatria-ksatria terbaiknya, termasuk...” “Keparat kau! Bajingan! Anjing!” perempuan di ujung peti yang bakup wajahnya itu, meledak dalam amarah dan merangsek maju. Maria meronta dan mulai berteriak. “Kesatuan negara yang mana? Yang harga mati itu?” raungnya: “Yang harga mati itu kemanusiaan! Yang harga mati itu keluarga saya, Keparat Tolol! Enyah kau dari hadapan suami dan anak saya. Sangkamu kesatuan negara lebih penting daripada... Puih! Anjing!!” (Hal. 149, 152 & 158)	implisit melainkan disampaikan secara eksplisit.
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Hidup di Timor dan sering mendengar cerita—bahkan pernah membaca langsung referensi—tentang masyarakat sipil di Timor yang menjadi korban unimog (mobil tentara)
Konteks Sosial	Unimog dalam hal ini militer dan hubungannya dengan masyarakat sipil di NTT saat Timor Timur memanas	Pelanggaran HAM oleh militer yang dalam beberapa tugas di Timor Timur sering menewaskan masyarakat sipil dalam perjalanan.

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, kalimat-kalimat dirangkai dengan gaya bahasa satire dan sarkasme. Selain itu maksud yang hendak diutarakan dibebaskan secara eksplisit atau langsung. Sementara pada tataran kognisi sosial, dapat dijelaskan dengan posisi Felix sebagai masyarakat sipil di Timor yang prihatin dengan masyarakat sipil lainnya di Timor yang sering menjadi korban—penabrakan—oleh mobil unimog aparat militer. Dalam narasi dominan, militer dengan alasan kepentingan keamanan di Timor Timur kembali menyalahkan masyarakat sipil karena tidak berhati-hati. Penjelasan secara rinci akan dijelaskan pada tataran konteks sosial tentang situasi Timor Timur yang memanas dan bagaimana negara menurunkan banyak anggota militer untuk mengatasi kekacauan di Timor Timur.

Secara umum, sebagian besar pemerintahan dunia waktu itu—1990-an—menganggap Timor Timur sebagai isu pinggiran, sementara kalangan LSM, intelektual, dan aktivis HAM menganggapnya sebagai prioritas utama. Seiring dengan perkembangan informasi, pembantaian di Dili merupakan titik balik bagi perhatian pemerintahan dunia. Kebrutalan ABRI terpampang di layar televisi-televisi dunia. Maka semakin meningkatlah tekanan terhadap demokrasi Barat untuk menghukum Indonesia sebab alasan HAM. Namun, selama perekonomian masih stabil dan kekuasaan Soeharto tampak masih langgeng, kebanyakan pemerintah asing bersikap hati-hati dalam menyikapi pelanggaran HAM oleh Indonesia. Kebanyakan ekonom yang tertarik dengan Indonesia terus meyakinkan dunia bahwa ekonomi

Indonesia secara fundamental masih stabil sehingga represi militer efektif dalam menstabilkannya (Ricklefs, 2008: 637).

Syahnakri (2013: 329) mengemukakan bahwa salah satu persoalan utama dalam operasi-operasi militer di Timor Timur adalah ketidaksesuaian doktrin pelaksanaan pada level petunjuk lapangan, terkait dengan persenjataan dan teknologi militer yang dimiliki maupun ancaman yang dihadapi. Operasi infanteri, operasi kavaleri, operasi gabungan TNI—seperti kompi dalam pertahanan, batalyon, operasi udara, amfibi—yang merujuk pada *field manual* militer AS. Kemudian pada tanggal 16 September 1999, pemerintah Indonesia memutuskan secara resmi permintaan masuknya pasukan multinasional Interfet (*International Force for East Timor*) untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur (Syahnakri, 2013: 230).

Apabila kalkulasi operasi yang dilakukan dan bagaimana pengerahan kekuatan militer dalam prosesnya tentu tidak terlepas dari perjalanan-perjalanan yang sering kali memakan korban. Penelitian yang mencacah data tentang jumlah korban tentu masih minim, tetapi menggunakan imajinasi sosiologis, dapat dibayangkan bagaimana operasi-operasi yang langgeng dilakukan tentu tidak bisa memungkiri banyaknya korban kecelakaan di jalanan akibat pengabaian militer yang notabene sedang terburu-buru.

Tabel Analisis 5.11

Teks	Bersama kelompok diskusinya, Maria menemukan banyak bukti tentang pejabat-pejabat korup yang mengambil untung dari ketidakberdayaan dan kemiskinan masyarakat di NTT. Mereka mengambil tanah adat masyarakat dan membikin sertifikat atas namanya sendiri. Ada pula berhektar-hektar sabana tempat penggembalaan sapi yang diubah menjadi Hutan Tanaman Industri dan ditanami jati yang akan dipanen sendiri. Proyek-proyek pembangunan dirampok, anggaran belanja, bantuan sosial dan apa pun itu, tak ada yang luput dikorupsi. Pun saat kekacauan di Timor Timur meluas dan bantuan untuk pengungsi datang dari berbagai tempat, hanya sedikit yang sampai ke tangan pengungsi. Maria dan kawan-kawannya berusaha melaporkan temuan itu ke sana ke mari. Setelah lama berjuang dan tak kunjung ada perkembangan, Maria mengakui bahwa kelompoknya terlalu kecil untuk berhadapan dengan pejabat-pejabat korup. Orang-orang itu telah korup sejak dalam pikirannya, sehingga satu pejabat korup hanya akan digantikan oleh kroninya yang juga korup, dilindungi oleh rezim yang juga korup, dipermudah oleh sistem yang juga korup, dan didukung oleh budaya tidak tahu malu yang menjijikkan. Mereka tanpa malu saling melindungi kebusukannya, meski baunya lebih bangar daripada mayat orang-orang miskin yang bergelimpangan. (Hal. 152—153)	Dituturkan dengan gaya satire dan repetisi epistrofa
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Ketika kuliah, Felix suka berdiskusi dan berdemonstrasi menolak monopoli oleh pemerintah, korupsi, dan praktik menyimpang lainnya.

Konteks Sosial	Praktik korupsi zaman Orde Baru yang marak terjadi	Fakta yang menarik di sini adalah hubungan antara pihak militer dengan kapital swasta. Hal ini terlihat pada perkembangan perusahaan-perusahaan milik militer dan usaha patungan antara militer dan kapital swasta, baik domestik maupun internasional.
-----------------------	--	---

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, kalimat-kalimat dikonstruksi dengan gaya bahasa satire dan repetisi epistrofa. Epistrofa dalam teks, misalnya: *Orang-orang itu telah korup sejak dalam pikirannya, sehingga satu pejabat korup hanya akan digantikan oleh kroninya yang juga korup, dilindungi oleh rezim yang juga korup, dipermudah oleh sistem yang juga korup (...)*. Kemudian pada tataran kognisi sosial, dapat dihubungkan dengan kondisi Felix saat berkuliah, di mana ia suka berdiskusi dan berdemonstrasi menolak monopoli oleh pemerintah (korupsi), dan praktik menyimpang lainnya.

Pada dimensi konteks sosial dapat dijelaskan dengan menjelaskan kondisi birokrasi pada masa Orde Baru yang lancar dalam melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peristiwa pentingnya adalah masuknya pihak militer ke dalam kegiatan ekonomi yang terjadi pada 1958/1959 ketika sejumlah besar perusahaan Belanda dinasionalisasi dan diletakkan di bawah kontrol militer. Sesudah 1965, pihak

militer mengembangkan kekuatan ekonominya dengan mengontrol korporasi negara seperti Pertamina, Bulog dan Berdikari (Robison, 2012: 197).

Fakta yang menarik di sini adalah hubungan antara pihak militer dengan kapital swasta. Hal ini terlihat pada perkembangan perusahaan-perusahaan milik militer dan usaha patungan antara militer dan kapital swasta, baik domestik maupun internasional. Hubungan tersebut dilakukan dengan cara terciptanya hubungan pribadi yang intim antara para komandan militer dengan pengusaha Cina. Para jenderal punya akses tak terbatas terhadap sumber daya-sumber daya dan fasilitas milik negara, serta kekuasaan untuk memengaruhi alokasi lisensi impor/ekspor, konsesi hutan dan kontrak-kontrak negara (Robison, 2012: 198).

Setelah kudeta 1965, para perwira militer yang berada dalam kedudukan strategis mampu melakukan manipulasi kredit ekspor dan kontrak-kontrak negara bagi keuntungan perusahaan-perusahaan milik orang Cina yang dekat dengan para komandan militer. Dalam hubungan ini, valuta asing bisa didapatkan dengan kurs rendah untuk impor barang-barang dalam skala prioritas (disebut valuta BE, bonus ekspor). Valuta ini kemudian digunakan untuk mengimpor barang-barang yang tidak ada dalam daftar prioritas atau menjual surat izin itu tanpa ada kegiatan ekonomi. Perkiraan jumlah uang yang dimanipulasi dengan cara itu bervariasi antara 35—100 juta dolar AS pada 1968. Walaupun beberapa importer Cina tidak terdaftar, tidak satu pun pejabat pemerintah yang terlibat diseret ke pengadilan. Hanya sedikit dari dana tersebut yang dapat diselamatkan (Robison, 2012: 199).

Kasus lainnya melibatkan Coopa, sebuah perusahaan yang mendapatkan kontrak sebagai pemasok pupuk untuk program pemerintah, “Bimas Gotong Royong” dengan tujuan menyediakan pupuk bagi kaum tani dalam rencana besar “Revolusi Hijau”. Koran-koran Jakarta membongkar bahwa perusahaan itu gagal memasok pupuk yang telah dibayar kira-kira sebesar 711.000 dolar AS. Di samping kasus-kasus tersebut, terdapat kasus lain seperti penyelundupan dan penggelembungan harga peralatan yang diimpor untuk keperluan militer, di mana pihak militer membagi kredit dan kontrak kepada kelompok-kelompok bisnis (Robison, 2012: 199).

Selain itu, tahun 1971, Manning dalam Robison (2012: 202) mencatat bahwa lebih dari satu juta hectare wilayah konsesi hutan diberikan kepada lima organisasi para-militer. Hal ini berarti 10% dari seluruh wilayah hutan yang dicadangkan untuk dieksploitasi, 20%-nya sedang memproduksi. Ekspor kayu gelondongan memberikan kesempatan mendapatkan keuntungan besar kepada para pemilik konsesi, sementara perusahaan-perusahaan yang mendapat dukungan militer mempunyai kesempatan untuk merampok kayu dari wilayah perusahaan yang koneksinya lemah.

Dengan demikian, Robison (2012: 210—211) menyimpulkan keterlibatan militer ke dalam bisnis dalam tiga perspektif: *Pertama*, pihak militer menjalin hubungan dengan dunia bisnis. *Kedua*, aktivitas bisnis militer terutama dilakukan dengan membangun kemitraan menggandeng pengusaha Cina maupun asing. *Ketiga*, masuknya militer ke dalam bisnis membentuk sekelompok jenderal-wirausahawan untuk mengumpulkan kekuatan ekonomi dan politik yang cukup besar, melalui

pembagian jatah lisensi, monopoli, dan konsesi, serta penguasaan sumber daya milik negara.

Tabel Analisis 5.12

Teks	“Itu pastor tukang cari aman,” begitu Maria berkata. “Itu pasti antek Soeharto, keparat betul! Bicara seperti sedang menjilat-jilat pantat. Penjilat begitu menyebut dirinya pelayan Tuhan? Puih! Tak tahu malu ya, anjing itu? Dia ingin menyebarkan kasih Tuhan, atau terlalu pengecut untuk melawan penindasan?” ... “Jangan jadi pastor hedonis, Yosef!” begitu katanya sambil pura-pura memperhatikan pemanggang roti itu. “Tiap-tiap hari ada orang mati. Mati karena perang atau mati karena lapar. Mati. Tapi kau makan kenyang di pastoran sambil mengeluhkan pemanggang roti jahanam ini? Gembala macam apa kau? Tak tahu malu kau, ya?” (Hal. 174 & 175)	Dituturkan dalam bentuk dialog yang disiasati dengan gaya satire dan sarkas.
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Seorang ex-frater yang tidak menyukai kebisuan agama di hadapan berbagai ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil. Selain itu, teks ini juga merupakan bentuk antipati Felix terhadap para klerus yang lebih cenderung memihak kelas atas ketimbang kelas bawah.
Konteks Sosial	Agama di masa Orde Baru	Orde Baru menjadi produsen rumah ibadah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apabila diperiksa KTP, hampir

		tidak ada satu pun kartu yang tidak menunjukkan agama pemegangnya. Agama menjadi perumus identitas, bahkan menjadi identitas itu sendiri.
--	--	---

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, disajikan dengan dalam format dialog-dialog yang dibubuhi dengan pernyataan-pernyataan satire dan sarkas. Karena itu, pada tataran kognisi sosial, melukiskan posisi Felix sebagai seorang ex-frater yang tidak menyukai kebisuan agama di hadapan berbagai ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil. Selain itu, teks ini juga merupakan bentuk antipati Felix terhadap para klerus yang lebih cenderung memihak kelas atas ketimbang kelas bawah.

Pada konteks sosial dapat dijelaskan dengan menghubungkannya dengan peran agama waktu Orde Baru. Bagi Dhakidae (2003: 513) Orde Baru menjadi produsen rumah ibadah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apabila diperiksa KTP, hampir tidak ada satu pun kartu yang tidak menunjukkan agama pemegangnya. Agama menjadi perumus identitas, bahkan menjadi identitas itu sendiri. Agama menjadi diskursus, medan pertandingan antara beberapa rezim kebenaran yang dibela agama masing-masing yang mungkin tidak berjalan normal, yang satu lebih berkuasa dari yang lain, karena dukungan modal dan dukungan kekuasaan negara dan institusi sosial lainnya.

Dalam kaitannya dengan ideologi, Dhakidae (2003: 538—541) menemukan tiga temuan, yakni: *Pertama*, agama direduksi menjadi *social fact*. Karena itu, agama secara primordial senantiasa hadir sebagaimana seseorang hanya lahir untuk menjadi milik suatu bangsa, ras, dan agama tertentu. Agama menjadi *the second nature* dari siapa pun. *Kedua*, seseorang bukan berada dalam bentuk abstrak akan tetapi manusia milik dunianya. Dalam hubungan ini, masyarakat dan negara hampir tidak bisa dipisahkan dari agama. Ketika negara mengambil bagian dan menempatkan dirinya di atas masyarakat, maka biasanya mengambil sebagian besar wewenang yang sedianya hanya milik agama sebegitu rupa sehingga negara mengatur agama itu sendiri. *Ketiga*, dimensi eskatologis. Eskatologi—doktrin tentang akhirat—adalah suatu istilah khas yang lebih menunjukkan sesuatu yang “akhir” dan hampir semua agama menafsirkannya sebagai akhirat, di kala semesta kembali kepada ketiadaan.

Semua itu hanya mau mengatakan bahwa kondisi-kondisi penindasan dan kekerasan di masa Orde Baru membangkitkan khayalan-khayalan keselamatan di akhir namun khayalan-khayalan itu memaksa suatu keputusan. Hal itu kemudian menjadi sebuah letupan untuk melihat agama sebagai lembaga kekuasaan dan ideologi azali—yang berfungsi kritik terhadap pembenaran kekuasaan, eskatologis—untuk memeriksa Orde Baru. Penjelajahan politik di sini adalah memeriksa agama sebagai diskursus dalam pengendalian *politics of exclusion*, memeriksa lembaga pengendali dan penafsir agama dalam pergaulannya dengan sesuatu di luarnya (Dhakidae, 2003: 553).

Tabel Analisis 5.13

Teks	“Alasan mereka?” ia bertanya kembali sambil membetulkan duduknya, dan sesudah Romo Yosef mengangguk ia menjawab dengan mantap: “Karena mereka malas, Usi Romo. Mereka malas belajar dan tidak mau bekerja keras untuk membalas jasa orang tuanya. Mereka sengaja melakukan demonstrasi agar bisa membolos kuliah. Selain itu, mereka ingin agar Bapak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Haha. Mereka lupa bahwa hanya karena jasa beliau seoranglah, mereka bisa mengembuskan napas kehidupan. Mereka bisa hidup karena Bapak Presiden Soeharto. Bapak Presiden Soeharto telah berperang mengusir penjajah Belanda dari republik ini. Beliau juga menumpas komunis dari bumi Indonesia. Beliau yang berjasa mengembalikan Timor Timur kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Beliau jugalah yang memperkenalkan kita kepada nasi, makan beradab itu. Tanpa beliau, kita hanya orang primitif yang terjajah, yang telah mati dibunuh oleh komunis. Sungguh besar jasa beliau. Haha. Rupanya, para demonstiran itu kurang belajar dari sejarah. Hahaha.” (Hal. 187)	Diungkapkan dengan gaya satire dan berupa repitisi anafora
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Felix pernah menjadi seorang demostran ketika kuliah, sering berdiskusi dan memiliki empati terhadap masyakat yang menderita. Felix juga memiliki pengetahuan sejarah yang cukup luas tentang pembasmian PKI secara besar-besaran
Konteks Sosial	Orde Baru dan kediktatoran Soeharto dalam menumpas simpatisan PKI dan mereka yang dituduh PKI	ideologi Orde Baru menumpas PKI dan menempatkannya dalam

		bahasa yang kejam, sebagai ateis yang menyebarkan rasa tidak puas di kalangan orang yang tidak tahu apa-apa. Di NTT, bermunculan propaganda bahwa PKI berencana untuk membunuh warga Kristen, yang diungkapkan oleh militer untuk menakut-nakuti kelompok elite agar mereka bersedia bekerja sama dalam pembantaian-pembantaian anti-komunis, diulang-ulang, dan diperlakukan sebagai fakta
--	--	--

(Sumber: Abstrasi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Teks dituturkan dengan kalimat-kalimat sarkas dan satire. Dibarengi dengan permainan repetisi anafora. Pada tataran kognisi sosial, bisa disorot kehidupan Felix di Jawa, di mana ia sering terlibat dalam diskusi tentang pembelaan hak-hak masyarakat kecil, demonstrasi di jalan, dan sering melihat aparat keamanan yang represif. Hal itu diselingi dengan pengetahuan sejarahnya tentang pembasmian PKI di masa Soeharto.

Orde Baru dibangun di atas puing-puing berdarah dan menyimpan banyak ingatan buruk. Diawali dengan kudeta pada 1 Oktober 1965—pembunuhan enam jenderal dan satu perwira TNI AD—oleh sekelompok perwira Angkatan Darat, yang kemudian berimplikasi pada pembasmian Partai Komunis Indonesia (PKI). Dhakidae

(2003: 201—208) menjelaskan beberapa pandangan tentang kudeta tersebut: *Pertama*, teori “resmi” versi militer yang kemudian menjadi teori resmi milik rezim Orde Baru. Menurut versi ini seluruh peristiwa tersebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Bukti-bukti yang dikemukakan adalah fakta bahwa para jenderal dibawa ke Halim Perdanakusuma, tempat latihan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Bukti lainnya adalah kehadiran D. N. Aidit di Halim, tempat jasad para jenderal dibuang. Kehadiran Ketua Umum PKI tersebut menjadi dasar dugaan kuat bahwa PKI mengambil peran besar dalam rentetan peristiwa pembunuhan para jenderal. Bukti yang lain adalah peran aktif Gerwani yang menurut siaran-siaran Angkatan Darat terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kedua, teori yang menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan para jenderal adalah kudeta yang dijalankan oleh kelompok perwira muda Angkatan Darat, khususnya sayap militer dengan basis divisi Diponegoro di Semarang. Teori ini secara konsisten mengatakan kudeta tanggal 1 Oktober 1965 adalah peristiwa internal Angkatan Darat, sedangkan PKI dan Soekarno terseret ke dalam peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Kedua-duanya hanya memberikan reaksi yang keliru setelah terjadinya pembunuhan yang lebih memberikan akibat fatal bagi pengikut-pengikutnya. *Ketiga*, teori yang menyatakan bahwa yang sesungguhnya bergerak di balik semua peristiwa tersebut adalah *Central Intelligence of America* (CIA) yang sudah lama membina hubungan dengan Angkatan Darat dan Soeharto dijadikan sebagai anak buah Amerika. *Keempat*, versi profesor Wertheim yang mengatakan bahwa bukan PKI atau para perwira muda, tetapi Soeharto sendirilah yang menjadi

otak kudeta tersebut. *Kelima*, versi Wieringa yang mengajukan “tesis dua kudeta” yaitu oleh perwira muda-menengah Angkatan Darat dan Soeharto.

Namun, yang terjadi, versi pertama yang menjadi wacana dominan yang kemudian menjadi alasan pembantaian PKI secara besar-besaran. Dhakidae (2003: 219—225) menjelaskan bahwa ketika keputusan resmi keluar bahwa semua anggota maupun simpatisan PKI harus dibersihkan dari negara Indonesia, mereka diklasifikasikan menjadi tiga kategori: *Pertama*, kategori A, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam G30S/PKI baik di pusat maupun daerah. *Kedua*, kategori B, yaitu mereka yang telah disumpah atau menurut saksi telah menjadi anggota PKI atau pengurus organisasi massa yang seazas dengan PKI atau mereka yang menghambat usaha penumpasan G30S/PKI. Yang termasuk kategori B adalah kaum cendekiawan kiri yang dipisahkan dari masyarakat dan ditahan pada suatu tempat. *Ketiga*, kategori C, adalah mereka yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI-Madiun, atau anggota ormas seazas dengan PKI, dan mereka yang bersimpati atau telah terpengaruh menjadi simpatisan PKI.

Dalam seluruh situasi itu, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin oleh Major Djenderal Soeharto, memainkan peran penting untuk merumuskan propaganda, mengatur strategi, termasuk strategi berbahasa (pemilihan diksi) guna mengatur dukungan massa, dan menentukan apa yang perlu diketahui oleh publik dan apa yang tidak perlu diketahui oleh publik. Langkah terpenting saat itu ialah proses *afkorting* seluruh frase “Gerakan Tigapuluh September” menjadi “G.30.S” yang tetap bertahan dalam kestabilan makna, anti kritik, dan dipropagandakan terus-

menerus. Mulai saat itu *gerakan*, *peristiwa*, dan *PKI* selalu diidentikan sebagai sebuah gerakan yang bertentangan dengan negara dan mesti dibasmi para pengikutnya.

Ringkasnya, ideologi Orde Baru menempatkan PKI dalam bahasa yang kejam, sebagai ateis yang menyebarkan rasa tidak puas di kalangan orang yang tidak tahu apa-apa. Karena itu, di NTT, bermunculan propaganda bahwa PKI berencana untuk membunuh warga kristen, yang diungkapkan oleh militer untuk menakut-nakuti kelompok elite agar mereka bersedia bekerja sama dalam pembantaian-pembantaian anti-komunis, diulang-ulang, dan diperlakukan sebagai fakta (Klinken, 2015: 84). Para pemuda GMIT melempari atap rumah Sekretaris PKI provinsi, Tobias Rissi dengan batu, dan menghancurkan rumah pimpinan PKI lainnya. Mereka mencabut semua poster PKI yang masih berkibar, yang mereka anggap selama ini menjadi provokasi, bahkan komunisme menjadi musuh agama terus dikumandangkan dalam khotbah-khotbah, terutama katolik selama bertahun-tahun (Klinken, 2015: 289—290).

Tabel Analisis 5.14

Teks	“Lihat. Siapa yang bikin negara ini dilanda oleh krisis moneter? Siapa yang mendalangi protes besar terhadap Soeharto? Siapa yang bikin perang di Timor Timur? Kalau bukan Amerika siapa lagi? Bangsa-bangsa asing itu sejak dulu selalu berusaha untuk memecah-belah Indonesia. Mereka memecah-belah agar bisa menguasai kita.	Diungkapkan dalam bentuk dialog dengan gaya satire dan sarkasme
-------------	---	---

	<i>Divide et impera</i> . Kau tahu artinya? Tentu kau tahu. Bangsat betul mereka itu. <i>Mai pung puki!</i> " (Hal. 208—209)	
Kognisi Sosial	Felix K. Nesi	Posisi Felix sebagai seorang intelektual dari Timur, menempatkan dirinya sebagai orang yang pernah dijajah politik kolonialisme, dan menjadi korban penindasan politik global
Konteks Sosial	Imperialisme Amerika Serikat (AS)	Penjelasan khusus tentang imperialisme yang berkembang di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

(Sumber: Abstraksi pribadi peneliti/2022)

Penjelasan:

Pada tataran teks, kalimat-kalimat dikonstruksi dengan mengandalkan gaya bahasa satire dan sarkas. Dengan gaya tersebut hendak menekankan posisi Felix pada tataran kognisi sosial sebagai seorang intelektual dari Timur, menempatkan dirinya sebagai orang yang pernah dijajah politik kolonialisme, menjadi korban penindasan politik global. Karena itu, pada tataran konteks sosial dapat dijelaskan dengan menyorot imperialisme Amerika Serikat (AS) yang mulai dilakukan usai Perang Dunia II. Meskipun kata imperialisme memiliki arti yang berbeda-beda di sini penjelasan tentang imperialisme lebih dilihat sebagai istilah analitik ketimbang istilah polemik. Fokusnya ke cabang imperialisme yang biasa disebut imperialisme kapitalis

(*capitalist imperialism*), yang sering didefinisikan sebagai perpaduan kontradiktif antara “politik negara dan imperium (Harvey, 2010: 31). Dengan kata lain, melihat imperialisme dalam posisinya sebagai suatu proyek politik khusus dari pelaku-pelaku yang kekuasaannya didasarkan pada komando atas suatu teritori dan pada kapasitas untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya manusia dan alamnya untuk tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan militer, dengan proses-proses molekuler dari akumulasi kapital dalam ruang dan waktu.

Oleh karena itu, Arrighi dalam Harvey (2010: 32) menyatakan bahwa logika kekuasaan teritorial dan logika kekuasaan kapitalis perlu dibedakan. *Pertama*, motivasi-motivasi dan kepentingan-kepentingan dari agen masing-masing logika berbeda. Sang kapitalis yang menguasai kapital uang dan ingin meletakkan kapitalnya di mana pun laba bisa didapat dan menggandakannya, sementara para politisi dan negarawan berusaha mengejar keluaran-keluaran yang akan melanggengkan kekuatan negara mereka sendiri *vis a vis* kekuatan-kekuatan negara yang lain. *Kedua*, sang kapitalis mengejar keuntungan individual meski dibatasi oleh hukum dan hanya bertanggung jawab terhadap lingkaran sosialnya terdekatnya sendiri, sementara negarawan dan politisi mengejar keuntungan kolektif dan dibatasi oleh situasi politik dan militer dari negara. *Ketiga*, sang kapitalis beroperasi dalam ruang dan waktu yang kontinyu, sementara politisi beroperasi dalam suatu ruang teritorial tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, praktik-praktik imperialistik dari sudut pandang kapitalistik pada intinya berorientasi pada praktik eksploitasi

ketidakseragaman kondisi-kondisi geografis, di mana di dalamnya akumulasi kapital berlangsung dan bagaimana memanfaatkan apa yang Harvey sebut sebagai asimetri-asimetri yang niscaya tercipta dari relasi-relasi pertukaran yang bersifat spasial. Asimetri-asimetri yang dimaksud adalah adanya pertukaran yang timpang, adanya kekuatan-kekuatan monopoli yang bersifat spasial, adanya praktik pemerasan yang mengiringi arus kapital, dan adanya pengisapan rente-rente hasil monopoli (Harvey, 2010: 37). Akibatnya, kondisi kesetaraan yang biasanya berlaku dalam pasar-pasar dilanggar sehingga ketidaksetaraan tercipta secara spasial dan geografis, kemakmuran dan kesejahteraan teritori-teritori tertentu dicapai dengan mengorbankan teritori-teritori yang lain, kondisi geografis yang tidak seragam tidak tercipta karena adanya pola keberadaan sumber daya alam dan keuntungan lokasi yang berlainan, tetapi sebagai akibat dari pertukaran-pertukaran yang asimetris.

Penjelasan tersebut membuka pintu untuk memahami sejarah singkat imperialisme. Belajar dari Inggris dan Prancis, AS mempraktikkan bentuk imperialisme baru dengan siasat menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan ke seluruh pelosok dunia dengan mengerahkan uangnya, dan menciptakan transisi dari imperium informal menjadi imperialism formal. Dengan kata lain, AS memegang komando dunia dengan melancarkan kekuasaan lunak (*soft power*) ketimbang kekuasaan yang keras (*hard power*), atau yang hegemonik daripada represif (Harvey, 2010: 5&7).

Analisis tentang imperialisme AS marak bermuculan pada tahun 1960-an, terutama berfokus pada peran AS di Amerika Latin dan negara-negara Asia Timur

dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Klare dalam Harvey (2010: 22) mengemukakan bahwa waktu itu, timbul suatu pandangan bahwa penguasaan dunia bergantung pada penguasaan minyak di Asia, sehingga timbul suatu proposisi bahwa siapapun yang mengontrol Timur Tengah akan mengontrol jalur minyak global, dan akan memegang kendali ekonomi dunia untuk masa depan. Konsekuensinya pada segi permintaan pasar. AS semakin bergantung pada impor asing, bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis di Asia Timur dan Asia Tenggara nyaris merebut cadangan minyak yang penting. Karena itu, akses ke Timur Tengah dan Asia Tenggara menjadi isu krusial bagi AS yang mendesak dan memotivasi negara-negara yang disebut Dunia Ketiga dengan berupaya merebut kontrol strategis dan militer yang lebih kuat, bahkan secara unilateral (Harvey, 2010: 29).

Karena itu, upaya imperialisme dalam titik tertentu sangat hegemonik. Konsep hegemoni kerap merujuk pada kekuasaan politik yang dijalankan melalui kepemimpinan dan penerimaan dari yang diperintah, kerap merujuk pada kombinasi antara koersi dan penerimaan dari suatu kekuasaan politik. Lebih lanjut, mengutip Arrighi, Harvey (2010: 42) menuliskan bahwa dalam kasus relasi-relasi antarnegara, supremasi suatu kelompok/negara terejawantahkan dalam dua cara yakni dominasi dan kepentingan intelektual dan moral. Dengan demikian, negara yang mendominasi menundukkan lawannya dengan melikuidasi mereka menggunakan kekuatan bersenjata dan kepemimpinan politik yang membangun suatu daya tarik, model yang patut diikuti dan ditiru oleh negara-negara lain dalam hal pembangunan.

Contoh kasusnya ialah bagaimana peran istimewa dari institusi keuangan AS dan departemen keuangan AS dengan dukungan IMF menimbulkan aksi devaluasi yang kejam terhadap asset-aset di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia), sehingga terciptalah pengangguran massal, dan secara efektif menihilkan kemajuan sosial dan ekonomi pada negara-negara tersebut.

AS keluar dari Perang Dunia Kedua sebagai kekuatan paling dominan dengan menguasai teknologi dan produksi. Dollar—yang didukung oleh suplai emas terbesar di dunia—menjadi mata uang terkuat. Aparatus militernya jauh lebih unggul dari negara-negara lain. Satu-satunya penentang adalah Uni Soviet namun negara itu telah kehilangan banyak penduduknya dan mengalami kemerosotan yang parah dalam kapasitas militer. AS menjalankan kepemimpinan atas negara-negara yang sama-sama berdedikasi pada terciptanya akumulasi kapital tiada henti. Implikasinya, AS telah menyebarkan cara-cara berbisnisnya ke berbagai negara di dunia. Dengan demikian, periode dari tahun 1945—1970 menjadi tahap kedua kekuasaan politik kaum borjuis yang beroperasi di bawah dominasi dan hegemoni AS. Namun, tahap kedua ini memunculkan kontradiksi-kontradiksi: *Pertama*, munculnya penolakan secara formal terhadap rasisme di level internasional yang telah menimbulkan kesulitan di dalam negeri AS. *Kedua*, kebijakan pasar terbuka menjadikan AS rentan terhadap kompetisi internasional. *Ketiga*, terjadi konflik antara demokrasi di mana ketertiban dan stabilitas yang dibangun di atas kepentingan orang-orang kaya dan AS menjadi patron orang-orang kaya itu. *Keempat*, dampak dari Perang Dingin dan

keterlibatan negara-negara yang menjadi kompleks industri militer yang sangat berkuasa (Harvey, 2010: 66—68).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa lanskap geografis dari aktivitas kapitalis diselimuti oleh kontradiksi dan ketegangan-ketegangan, di mana lanskap itu terus-menerus tidak stabil ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan teknis dan ekonomi. Ketegangan antara kompetisi dan monopoli, antara konsentrasi dan penyebaran, antara sentralisasi dan desentralisasi, antara diam dan bergerak, antara dinamisme dan inersia, antara skala aktivitas-aktivitas yang berbeda. Ketegangan-ketegangan tersebut terperangkap dalam ekspansionis dari suatu sistem kapitalis, di mana akumulasi kapital yang tiada henti berlangsung di dalamnya dan didominasi oleh motif pencarian akan laba yang tiada akhir (Harvey, 2010: 112). Agregat efeknya seperti tekanan pada novel *Orang-Orang Oetimu*, kapitalisme terus berupaya untuk menciptakan suatu lanskap geografis yang bisa terus memfasilitasi aktivitas-aktivitas di satu waktu, dan untuk dihancurkan dan dibangun lanskap baru yang sepenuhnya berbeda di titik waktu yang lain agar nafsu keserakahan kapitalis-imperialis untuk mengakomodasi kapital tiada henti terakomodasi. Inilah bentuk imperialisme yang bisa terbaca dari konteks novel.

5.2 Interpretasi Data

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada tataran teks, Felix sebagai pengarang lebih banyak menggunakan gaya bahasa sinisme, satire, sarkasme, dan repetisi (pengulangan) yang justru diasiasi dalam pernyataan atau dialog-dialog yang dilontarkan para tokoh yang membangun narasi novel *Orang-Orang Oetimu*. Dengan gaya tersebut, tafsir peneliti, digunakan sebagai sebuah gaya bicara Felix yang langsung menyasar pokok permasalahan. Penggunaan repetisi diasiasi sebagai manifestasi penegasan dan penekanan terhadap apa yang ingin dikritik Felix. Ringkasnya, Felix berbahasa sebagai kelas bawah yang memprotes banyak hal dari negara, agama, dan militer.

Sementara sinisme, satire, dan sarkasme menjadikan bahasa Felix sebagai parodi di satu sisi, dan *black comedy* di sisi yang lain. Parodi dalam arti Felix membuat sebuah pembelokan atau deviasi terhadap cerita-cerita yang sudah dianggap mapan atau suci oleh masyarakat dengan maksud membuat sebuah terobosan cerita baru. Sementara *black comedy* secara umum dipahami sebagai subgenre komedi yang mengangkat sisi lucu dari hal-hal yang biasanya dianggap sangat serius untuk dijadikan bahan tawa (Alexander, 2020: 98). Karena itu, penyampaian kritik dengan *black comedy* sering kali menyajikan peristiwa-peristiwa kekerasan atau traumatis secara mengerikan sekaligus menggelikan, dan pada titik tertentu mempertanyakan persepsi pembacanya. Topik-topik yang dianggap serius bahkan tabu dilucuti keseriusannya dan diguyoni secara satiris, sarkatis, dan sinis. *Black comedy* tak segan-segan mencandai bencana-bencana kemanusiaan serta menjelajahi beragam

tema dan isu vulgar yang mencemaskan bagi khalayak luas, bahkan perkara-perkara yang dipandang sensitif seperti agama, kematian, barbarisme, kekerasan, seksualitas, rasisme, genosida, penyakit, dan kecacatan.

Namun eksploitasi atas penderitaan korban yang dilakukan oleh Felix sebagai pengarang parodi dan *black komedy*, bukannya tanpa tujuan. Lelucon-lelucon tersebut bermaksud membangun rasa simpati dan empati pembaca terhadap korban atau kejadian yang disorot. Karena itu, sebagai sebuah novel sejarah, novel *Orang-Orang Oetimu* mencoba mengungkit luka sosial yang tak kunjung kering, mengguyoni teks-teks suci, lewat parodi dan humor tragis (*black comedy*) dengan mengajak pembaca menertawakan hal-hal yang semestinya tidak pantas ditertawakan.

Oleh karena itu, pada tataran teks, kritik-kritik Felix eksplisit (langsung) dalam kebahasaan tetapi implisit (tidak langsung) dalam strategi, di mana Felix menuliskan kritiknya secara sarkas, sinis, dan satire dengan menunggangi tokoh-tokoh dalam novel, atau dengan kata lain menitipkan pesan dan maksudnya lewat kata-kata tokoh yang dihadapkannya dalam novel. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa yang mengajukan kritik-kritik Felix adalah tokoh-tokoh dalam novel yang posisinya adalah kelas bawah, kaum terpinggirkan, dan termarjinalkan. Dengan kata lain, kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Oetimu* merupakan sublimasi dari posisi Felix yang memprotes negara, militer, agama, dan imperialisme Amerika.

Lebih lanjut, pada tataran kognisi sosial, menggambarkan kecenderungan pandangan-pandangan Felix yang merupakan manifestasi dari kecenderungan mental kolektif. Dengan kata lain, Felix tidak dilihat sebagai individu otonom, tetapi sebagai

trans-individu atau dalam relasinya dengan individu-individu lainnya (kolektif). Dalam kompleksitas masyarakat, Felix menjadi individu yang terjaring ke dalam pelbagai bentuk pengelompokan sosial, seperti kelompok profesi, kelompok etnis, ras, pendidikan, dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap posisinya dalam berkomunikasi lewat novel.

Dapat dilihat dengan jelas posisi Felix dan keberpihakannya: masyarakat kelas bawah. Posisi itu diwarnai dengan pengalaman kehidupan Felix yang pernah menjadi frater (bagian penting dari institusi gereja), pernah menjadi mahasiswa yang suka berdiskusi tentang kemanusiaan dan berdemo menentang ketidakadilan (bahkan sampai sekarang), dan terutama orang Timor yang sering disepelekan dan dipandang sebelah mata dalam berbagai bidang kehidupan (ditempatkan dalam pinggiran atau Timur dalam paradigma orientalisme). Pada titik inilah, Felix dengan kedalaman pengetahuannya menjadi pengarang yang membela kelas bawah yang didominasi dan dihegemoni.

Dengan penjelasan di atas—teks dan kognisi sosial—maka pada konteks sosial dapat dilihat bahwa Felix secara intens menyorot bagaimana praktik kekuasaan negara, agama, militer, dan masyarakat sipil di Indonesia. Secara spasial, konteks novel *Orang-Orang Oetimu* adalah letak geografis Indonesia pada umumnya, dan Timor (Timur dan Barat) pada khususnya, sedangkan secara temporal menukilkan intrik politik Indonesia pada masa Orde Baru, yang selalu punya kaitannya dengan penyelewengan kekuasaan, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM. Intrik politik tersebut kemudian dihubungkan dengan dinamika politik dunia—imperialisme

Amerika Serikat—dan implikasinya pada politik lokal yang dinukilkan secara tajam tentang politik Timor Timur (Timor Portugis).

5.2.1 *Orang-Orang Oetimu* dalam Terang Kekuasaan Foucault

Apabila wacana kritis dilihat sebagai sebuah paradigma, maka dalam novel *Orang-Orang Oetimu*, masa Orde Baru dilihat sebagai proses pengambilalihan wacana yang dipertahankan dalam suatu lingkaran sistemik yang kuat dalam bentuk formalisasi, birokratisasi, dan militerisasi. Lingkaran sistemik itulah yang berhak menentukan mana kawan dan mana lawan negara. Karena itu, kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Oetimu* dalam teropong Foucault adalah: *Pertama*, kuasa adalah relasi. Dalam situasi relasi seperti ini, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, jurnalisme, dan agama dijadikan kawan yang memproses kebijakan wacana dalam seluruh doktrin dan ritus yang dikembangkan menuju pengambilalihan kekuasaan. Implikasinya, agama menjadi politikal yang berkewajiban mengaku satu azas yakni Pancasila sekaligus menjadi alat untuk keperluan kekuasaan. Kampus menjadi politikal ketika semua rektor adalah penguasa tunggal dan mahasiswa mesti taat pada segala regulasi. Ilmu menjadi politikal ketika harus menjadi alat untuk membenarkan kebijakan. Ringkasnya, semuanya menjadi bayang-bayang penuh dari penguasa tunggal Orde Baru sebagai pemilik kedaulatan.

Kedua: kekuasaan tidak terpusat dan dimiliki, melainkan menyebar dan justru bergerak dari pinggir. Kebenaran tidak diungkapkan seperti yang terus dipromosikan oleh otoritas, melainkan muncul dari kelompok-kelompok kecil. Di titik ini, sejarah

menjadi arena perjuangan, diskursus yang terputus, diskontinu, fragementaris dan acak. Novel *Orang-Orang Oetimu* disajikan Felix dengan menyorot sejarah sebagai hasil konstruksi. Di dalamnya terdapat kekerasan politik, kerakusan kekuasaan, dan kolaborasi yang kuat antara kekuasaan dan pengetahuan. Akibatnya, sejarah yang berkembang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan eksploratif dan eksploitatif sehingga perlu dikritisi. Selaras dengan penjelasan Foucault, Felix tidak menulis tentang sejarah (*about history*) tetapi menulis banyak hal dalam perkembangan sejarah (*in history*). Aktivitas ini dipraktikkan dengan menggali kembali sejarah, membongkarnya, dan menemukan kepalsuan-kepalsuannya. Ringkasnya, Felix mendekonstruksi dan meredefinisi segala sesuatu yang dianggap mapan secara konvensional dalam komunitas ilmiah.

Sehubungan dengan itu, kebenaran tidak terletak di luar kekuasaan tetapi ada di dalam kekuasaan. Penjelasan tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami konsep kekuasaan Foucault yang *Ketiga*: kekuasaan dan pengetahuan. Kebenaran menjadi produk dari relasi kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kekuasaan. Melalui dua matra tersebut, Foucault menunjukkan secara jelas adanya hubungan antara ilmu-ilmu kemanusiaan dengan teknologi dominasi. Bisa dikatakan bahwa kekuasaan terwujud dalam relasi. Preposisi tersebut menunjukkan bahwa ideologi yang dianut dalam novel ini adalah perlawanan akan dominasi, di mana kekuasaan menjadi praktik sentral dan dapat menjadi strategi untuk membongkar manipulasi oleh kelompok dominan atau kelas yang berkuasa.

Oleh karena itu, *Keempat*, kekuasaan dan resistansi. Dalam hal ini, pendekatan arkeologi dan genealogi Foucault dapat dipakai. Secara arkeologis, novel ini tidak ditulis untuk melacak struktur pengetahuan atau pun moralitas universal, tetapi memeriksa instansi-instansi wacana—termasuk negara—yang mengartikulasikan apa yang mesti dipikirkan, dikatakan, dan dikerjakan oleh masyarakat. Sementara secara genealogis, novel *Orang-Orang Oetimu* menggambarkan bagaimana individu modern sebagai subjek maupun objek, lahir dan diciptakan oleh multiplisitas jaringan kekuasaan. Melalui teknik disiplin dan normalisasi, individu diciptakan sebagai objek, dan melalui praktik pengakuan dan penguasaan diri dalam wacana seksualitas, individu diciptakan sebagai subjek yang membicarakan dirinya sendiri.

Pada titik tertinggi, kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Oetimu* adalah personifikasi dari upaya kontra-hegemoni terhadap kelas yang mendominasi dengan meletakkan pengetahuan sebagai basis perlawanan. Pengetahuan itu terformatkan dalam strategi Felix dalam menulis novel *Orang-Orang Oetimu*: memberi penekanan pada narasi yang alpa di mata publik dan memudahkan kebenaran yang selama ini dipatenkan oleh kelas yang mendominasi. Dengan demikian, kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Oetimu* merupakan manifestasi posisi Felix sebagai golongan kelas bawah yang notabene mendapatkan banyak ketidakadilan, dieksploitasi, dan didepak dari kesejahteraan. Karena itu, wacana menjadi praktik diskursif yang coba dijadikan Felix sebagai medan perlawanan.